

**STUDI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
SAMARINDA**



OLEH :

ARTHA ANGELINA SEPANG
NPM : 2263201072

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2026

**STUDI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
SAMARINDA**



OLEH :

ARTHA ANGELINA SEPANG
NPM : 2262201072

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Dinas
Sosial Sosial Dan Pemberdayaa Masyarakat Kota Samarinda

Nama Mahasiswa : Artha Anggelina Sepang

NPM : 2263201072

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

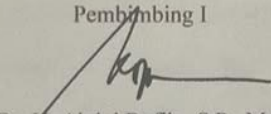
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

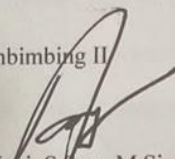
Samarinda, 01 April 2026

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

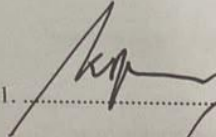
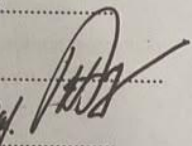
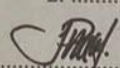

Dr. H. Abdul Rofik., S.P., M.P
NIDN. 2023070326


Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIDN. 1106118701



Penguji :

1. Dr. H. Abdul Rofik., S.P., M.P
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
3. Trisna Waty Eryani, S.Sos., M.Si

1. 
2. 
3. 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Artha Angelina Sepang

NPM : 2263201072

Judul Skripsi : Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

Dengan ini saya menyatakan dan menandatangani bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiat ataupun mengambil karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang semestinya. Saya menyatakan bahwa seluruh bagian dalam skripsi ini, baik isi, data, maupun analisis, adalah hasil pemikiran, penelitian, serta kerja saya secara mandiri.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung ketidakaslian atau terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi akademik, termasuk pembatalan skripsi sesuai ketentuan yang berlaku. Lembar pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh saya sebagai mahasiswa yang bersangkutan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Samarinda, 01 April 2026

Yang membuat pernyataan

Artha Angelina Sepang
NPM. 2263201072

RINGKASAN

ARTHA ANGELINA SEPANG, Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Sarinda, dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP dan Bapak Yani, S.Sos., M.Si.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas individu maupun kelompok. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda melaksanakan berbagai program pemberdayaan yang mencakup bidang ekonomi dan UMKM, kelembagaan masyarakat, kesehatan dan sosial, partisipasi pembangunan, serta sarana dan prasarana lingkungan. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal, serta tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata. Kondisi tersebut menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat beserta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Selanjutnya, data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda telah berjalan cukup baik. Program pemberdayaan pada lima bidang utama mampu meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta penyediaan dukungan terhadap kegiatan masyarakat. Keberhasilan program didukung oleh adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta belum meratanya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi, penguatan sumber daya, serta evaluasi berkelanjutan agar program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Studi, Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, Kota Samarinda*

RIWAYAT HIDUP



Artha Anggelina Sepang, lahir pada tanggal 04 Juni 2004 di Berau, Tanjung Redeb, merupakan anak ke ketiga dari lima bersaudara dari ayah yang bernama Yosua Sepang dan Ibu Herlina Carolina. Saudara perempuan pertama bernama Julianan Indah, saudara laki-laki kedua Yehuda Patutuan Sepang, Artha Anggelina Sepang, Airinda Tesalonika Sepang dan yang terakhir Zefanya Olivia Sepang.

Pada tahun 2011 memulai pendidikan dasar dan lulus pada tahun 2016 di SDN 0013 Kecamatan Sangatta Utara, Kalimantan Timur. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 02 Sangatta Utara pada tahun 2017 hingga lulus pada tahun 2019. Pendidikan berikutnya di perguruan tinggi Swasta Universitas Widya Gama Mahakam Samrinda pada tahun 2022 di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan Program Studi Administrasi Publik. Pada Agustus 2025 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kerta Buana, Tenggarong Seberang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi yang penulis tempuh.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini, M.Pd., MT selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Godefridus Bali Geroda, S.Pd., M.Pd selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Kaprodi Administrasi Publik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu meberikan arahan serta masukan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembing II yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
6. Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah membantu proses

administrasi dan keperluan yang dibutuhkan oleh peneliti.

7. Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat bersama dengan seluruh staf yang ada di kantor Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah menerima dan membantu selama proses penelitian berlangsung.
8. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat seperjuangan saya yaitu Muzadi, Gresia Wella, William Christian, Nur Layla Ali, Rara Ulfa, Maria Dewika, Putri Regina, Rizqina, dan Laura Jessica yang selalu ada untuk mendukung dalam suka maupun duka. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan sukses selalu.
9. Ucapan terima kasih juga peneliti berikan kepada kedua orang tua saya Bapak Yosua Sepang dan Ibu Herlina Carolina serta saudara yang telah memberikan dukungan penuh kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan.

Akhir kata penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu, serta penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan informasi di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Samarinda, 01 April 2026

Penulis

Artha Anggelina Sepang
NPM. 2263201072

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
RINGKASAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Secara Teoritis	9
1.4.2 Secara Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori dan Konsep.....	11
2.1.1 Pemberdayaan masyarakat	13
2.1.2 Keberlanjutan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Prodebaya) Sebagai Program Unggulan Kota Samarinda.....	14
2.1.3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	18
2.2 Kerangka Pikir.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jadwal Penelitian	22
3.2 Jenis Penelitian	23
3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Definisi Konseptual	25
3.5 Fokus Penelitian	27
3.6 Sumber Data	28
3.6.1 Data Primer.....	29
3.6.2 Data Sekunder	30
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7.1 Observasi	32
3.7.2 Wawancara	33
3.7.3 Dokumentasi.....	34
3.8 Analisis Data	35
3.8.1 Pengumpulan Data.....	36
3.8.2 Reduksi Data	37
3.8.3 Penyajian Data.....	38

3.8.4 Penarikan Kesimpulan.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.2 Sejarah Singkat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Kota Samarinda.....	42
4.3 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.....	45
4.3.1 Tugas Pokok.....	46
4.3.2 Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki beberapa fungsi, antara lain	46
4.3 Visi Dan Misi	47
4.3.1 Visi	47
4.3.2 Misi.....	47
4.4 Keadaan Sumber Daya Manusia	48
4.5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat	48
4.6 Penyajian Data Dan Hasil Penelitian.....	49
4.7 Pembahasan	83
BAB V KESIMPULAN	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian	23
Tabel 4. 1 Rekaputulasi Data PNS dan Non PNS Dinsos Kota Samarinda.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir	21
Gambar 3. 1 Analisis Data Model Intreraktif	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi utama dalam pembangunan sosial di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Dalam konteks pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, mengelola potensi yang dimiliki, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pemerintah memiliki peran penting sebagai fasilitator dan penggerak melalui penyusunan kebijakan, penyediaan sumber daya, serta pelaksanaan program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sosial sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, serta evaluasi program kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda yang mengatur tentang susunan organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah

Kota Samarinda juga telah menetapkan regulasi teknis terkait pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui peraturan walikota yang mengatur mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi program pemberdayaan. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Samarinda.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pengembangan ekonomi dan UMKM, penguatan kelembagaan masyarakat, kegiatan kesehatan dan sosial, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta pembangunan sarana dan prasarana lingkungan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa pemberdayaan sosial merupakan bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dengan

demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi program tambahan, tetapi merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara terencana, terukur, dan efektif.

Secara normatif, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti pada :

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menegaskan bahwa program bantuan sosial harus terintegrasi dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat mampu menciptakan kemandirian.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial menekankan bahwa program bantuan sosial tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga diarahkan meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi penerima manfaat.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang mengatur pentingnya ketepatan sasaran bantuan sebagai dasar keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dinas ini menjalankan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembinaan kelembagaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan UMKM, kegiatan sosial kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. Berbagai program tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, masih ditemukan beberapa permasalahan yang memengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Pertama, pelaksanaan program pemberdayaan belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran sehingga manfaat program belum dirasakan secara merata. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masih belum optimal, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian program belum mampu memberikan dampak yang maksimal terhadap peningkatan kemandirian masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan program masih dijumpai kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki instansi dalam melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan. Di sisi lain, koordinasi antara

pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil kegiatan pemberdayaan juga masih perlu ditingkatkan sehingga keberhasilan program dapat diukur secara lebih komprehensif dan menjadi dasar dalam penyempurnaan program pada tahun berikutnya.

Permasalahan lainnya terlihat pada lima bidang utama pemberdayaan masyarakat. Pada bidang ekonomi dan UMKM masih terdapat pelaku usaha yang memerlukan peningkatan kapasitas usaha dan pendampingan. Pada bidang kelembagaan masyarakat masih diperlukan penguatan peran lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah. Pada bidang kesehatan dan sosial masih diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada bidang partisipasi pembangunan masih terdapat masyarakat yang belum berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Sementara pada bidang sarana dan prasarana lingkungan masih diperlukan peningkatan pemeliharaan serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada tersedianya program pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat, ketersediaan sumber daya, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta keberlanjutan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Samarinda serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Tentang Epektifitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di kantor Dinas Sosial, Kota Samarinda”** menjadi gambaran mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi dan UMKM, kelembagaan masyarakat, kesehatan dan sosial, partisipasi pembangunan, serta sarana dan prasarana lingkungan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang disusun secara jelas, terarah, dan spesifik mengenai persoalan yang akan diteliti, yang jawabannya dicari melalui pengumpulan data dan proses penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:58) “Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang hendak dicari jawabannya melalui pengumpulan data dan analisis data.”

Menurut Neuman (2019: 69) “Rumusan masalah merupakan inti dari penelitian, berupa pertanyaan yang menunjukkan apa yang ingin dipahami peneliti.”

Menurut Sujarweni (2020: 32) “Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang menjadi dasar dalam penyusunan tujuan penelitian dan

pengumpulan data.”

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalah adalah sebagian rangkaian pertanyaan peneliti yang dirumuskan secara jelas untuk menunjukkan hal yang ingin dipahami atau dikaji oleh peneliti, serta menjadi dasar dalam penentuan tujuan penelitian, pengumpulan data dan proses analisis data guna memperoleh jawaban yang ilmiah.

Berikut adalah permasalahan yang ingin diteliti melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pemberdayaan masyarakat di Kantor Dinas Kota Samarinda?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan fokus kajian, metode, proses pengumpulan data, dan analisis data agar penelitian dapat berjalan sistematis dan sesuai tujuan.

Menurut Lexy J. Moleong (2019: 6) “Tujuan penelitian adalah memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah.”

Menurut Wiratna Surjaweni (2021: 6) “Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.”

Sugiyono (2022: 4) “Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai peneliti dalam kegiatan penelitian yang dijelaskan secara jelas, terukur, dan dapat dicapai melalui proses ilmiah.”

Menurut pengertian para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai peneliti melalui proses penelitian ilmiah untuk memahami suatu fenomena secara mendalam, memperoleh serta mengembangkan pengetahuan, membuktikan kebenaran suatu konsep, dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan serta mengantisipasi berbagai permasalahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang ada di Kantor Dinas Sosial Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat di Kantor Dinas Sosial Kota Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil atau kegunaan yang diharapkan dari suatu penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan (teoretis) maupun bagi pemecahan masalah praktis di lapangan. Dengan kata lain, manfaat penelitian menjelaskan seberapa besar kontribusi penelitian tersebut bagi dunia akademik, lembaga terkait, serta masyarakat luas. Dalam penelitian ini juga dapat di artikan sebagai kegunaan hasil penelitian dalam menilai sejauh mana bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Samarinda mampu meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat

Menurut Arikunto (2019: 52) “Manfaat penelitian adalah guna atau dampak positif dari hasil penelitian yang dapat digunakan untuk memperbaiki, mengembangkan, atau meningkatkan praktik dan pengetahuan.”

Menurut Bungin (2017: 22) “Manfaat penelitian terletak pada kemampuan temuan penelitian dalam memberikan pencerahan, solusi, dan pemahaman baru terhadap fenomena yang diteliti.”

Menurut Sanapiah Faisal (2019: 67) “Manfaat penelitian ialah kontribusi hasil penelitian untuk memperbaiki pemahaman terhadap realitas sosial dan menyediakan dasar bagi tindakan atau kebijakan.”

Menurut pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa manfaat penelitian adalah dapat dikatakan sebagai kontribusi atau dampak positif dari hasil penelitian yang memberikan pemahaman baru, pencerahan, dan solusi terhadap fenomena yang diteliti. Manfaat penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki, mengembangkan praktik, meberikan pengetahuan, serta kebijakan dalam kehidupan sosial maupun bidang keilmuan terkait.

1.4.1 Secara Teoritis

- a) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Administrasi Publik, serta menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
- b) Menambah wawasan dan pemahaman pembaca mengenai pemberdayaan masyarakat, yang ada.

- c) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam menganalisis permasalahan secara ilmiah serta melatih penyusunan karya ilmiah sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku.

1.4.2 Secara Praktis

- a) Memberikan masukan dan rekomendasi bagi Dinas Sosial Kota Samarinda dalam meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pemberdayaan Masyarakat.
- b) Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki ketepatan sasaran, partisipasi masyarakat, dan sinergi antarprogram pemberdayaan.
- c) Memberikan informasi bagi pemangku kepentingan terkait, seperti organisasi masyarakat dan dunia usaha, dalam mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
- d) Menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa dan praktisi kebijakan publik dalam memahami praktik pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori dan Konsep

Teori merupakan kerangka berpikir atau dasar ilmiah untuk menjelaskan hubungan antara variabel penelitian (efektivitas bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat). Sedangkan konsep merupakan pengertian operasional atau abstraksi dari variabel-variabel yang diteliti agar dapat diukur dan dianalisis secara jelas. Teori merupakan landasan berpikir ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel penelitian.

Menurut Widodo (2021: 15) "Teori merupakan konstruksi ilmiah yang berfungsi sebagai alat analisis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antar fenomena, serta menjadi landasan dalam pengembangan kajian ilmiah.

Menurut Sugiyono (2017: 63) Menurut Sugiyono, teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena. Teori berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan hubungan antar variabel yang diteliti.

Menurut Sujarweni (2020: 27) "Teori adalah konsep-konsep yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan memahami fenomena penelitian."

Berdasarkan pendapat para ahli, maka peneliti menyimpulkan bahwa teori merupakan seperangkat konsep dan prinsip yang disusun secara sistematis dan logis untuk menjelaskan fenomena dan hubungan antar variabel serta menjadi dasar dalam merumuskan hubungan antar variabel dalam penelitian ilmiah.

Konsep adalah gagasan, ide, atau pemikiran dasar yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memahami suatu objek, peristiwa, atau fenomena tertentu. Konsep berfungsi sebagai dasar berpikir untuk menyusun teori, menganalisis masalah, dan mengembangkan pemahaman yang lebih jelas dan terarah terhadap suatu topik.

Menurut Sujarweni (2020: 32) menuliskan bahwa “Konsep merupakan ide atau pengertian dasar yang disusun secara logis untuk menjelaskan suatu fenomena dan menjadi landasan penyusunan teori.”

Widodo (2021: 15) “Konsep adalah konstruksi berpikir yang bersifat abstrak dan digunakan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan karakteristik fenomena penelitian.”

Prasetyo & Purnomo (2022: 6) “Konsep adalah struktur kognitif yang memuat makna tertentu dan digunakan sebagai pijakan dalam menyusun analisis ilmiah.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa konsep dapat dipahami sebagai ide atau pengertian dasar yang bersifat abstrak dan disusun secara logis untuk menjelaskan suatu fenomena. Konsep berfungsi sebagai konstruksi berpikir yang membantu mengidentifikasi serta menggambarkan karakteristik objek penelitian, sekaligus menjadi pijakan kognitif yang memuat makna tertentu sebagai dasar dalam penyusunan analisis ilmiah.

2.1.1 Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat secara umum adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan peran aktif masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan ini dilakukan melalui berbagai upaya seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan, agar masyarakat mampu mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain.

Menurut Edi Suharto (2018: 57) "Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan sosial yang bertujuan memperkuat kemampuan kelompok masyarakat lemah agar memiliki akses terhadap sumber daya, mampu berpartisipasi dalam mengambil sebuah keputusan, serta mencapai kemandirian dan kesejahteraan secara berkelanjutan."

Menurut Rina Herawati (2021: 41) "Pemberdayaan masyarakat adalah proses multidimensi yang melibatkan peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengakses sumber daya, mengambil keputusan, dan mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi melalui partisipasi aktif, pendidikan, dan dukungan institusional."

Menurut Endang Larasati (2019: 88) "Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, mendorong inovasi, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah."

Berdasarkan teori para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan sosial yang bertujuan

meningkatkan kemampuan individu dan kelompok, terutama pada masyarakat menengah agar dapat mampu mengelola sumber daya yang ada, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada. Melalui peningkatan strategi tersebut dapat diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada program bantuan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

2.1.2 Keberlanjutan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan

Masyarakat (Probebaya) Sebagai Program Unggulan Kota Samarinda

Probebaya adalah singkatan dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini merupakan program pemerintah daerah yang dilaksanakan di tingkat kelurahan dengan basis partisipasi masyarakat pada tingkat Rukun Tetangga (RT). Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) merupakan program unggulan Dr. H. Andi Harun, yang dicetuskan sejak pertama kali menjabat sebagai Wali Kota Samarinda periode 2021-2025. Program ini pada dasarnya mengedepankan percepatan pembangunan lingkungan baik fisik maupun non-fisik melalui peningkatan peran masyarakat secara langsung dari tingkat RT. Manfaatnya, selain percepatan pembangunan, lembaga kemasyarakatan yang berada di kelurahan menjadi lebih aktif dan berdaya, dan kedudukan kelurahan sebagai garda terdepan pembangunan dalam mengelola masyarakat semakin terlihat.

Probebaya memberikan dorongan kepada seluruh warga Kota Samarinda untuk ikut andil dalam pembangunan, terutama dalam menyukseskan program unggulan pemerintah Kota Samarinda. Kreatifitas, inovasi, dan kontribusi dari masyarakat semakin tergali dengan adanya program ini, yang mana semakin menonjolkan karakteristik dan potensi kelurahan masing-masing. Hal ini merupakan tujuan dari urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh Dinsospm Kota Samarinda. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan kedepannya oleh pemerintah Kota Samarinda yaitu :

1. Memastikan kelurahan aktif dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam cakupan wilayah kerjanya masing-masing.
2. Memastikan kelurahan mendokumentasikan data dan perkembangan wilayah masing-masing.
3. Memastikan seluruh lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat RT, kelurahan hingga kecamatan berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kota Samarinda.
4. Memastikan kelurahan, warga dan lembaga kemasyarakatan setempat memiliki inovasi, kreatifitas, dan rasa kesetiakawanan dalam menyelesaikan permasalahan diwilayahnya.

Dalam pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) Kota Samarinda, dasar hukum yang menjadi rujukan utama berasal dari regulasi nasional hingga regulasi daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur kedudukan kelurahan sebagai perangkat kecamatan serta menjadi dasar pengalokasian dana kelurahan.
3. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan untuk mengatur penggunaan dana kelurahan untuk pembangunan sarana-prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan penguatan kelembagaan masyarakat.
4. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) "Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disebut Probebaya adalah program Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan sosial kemasyarakatan".
5. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 merupakan perubahan atas Perwali Nomor 11 Tahun 2022 yang menyempurnakan ketentuan pelaksanaan dan penganggaran PROBEBAYA.

Probebaya dapat dipandang sebagai implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah yang sejalan dengan Permendagri Nomor 130 Tahun

2018. Bentuk kegiatannya meliputi :

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.
2. Penguatan kelembagaan RT dan kelompok masyarakat.
3. Kegiatan kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan.
5. Pembangunan sarana dan prasarana skala lingkungan.

Dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinsospm Samarinda juga melakukan telaah pada Renstra Dinas Pemberdayaan. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai oleh DPMPD Provinsi Kaltim yaitu :

1. Meningkatnya status desa .
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama desa.
3. Mendorong tata kelola pemerintahan desa.
4. Mendorong pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa.
5. Mewujudkan birokrasi yang akuntabel.

Sasaran strategis 1 dan 4 adalah sasaran yang berkaitan langsung dengan Dinsospm sebagai penyelenggara bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Meskipun tidak memiliki desa, namun Kota Samarinda tetap berupaya melaksanakan pembangunan dari bawah, hal ini tercermin dengan adanya program unggulan Wali Kota yaitu probebaya. Oleh karena itu peningkatan status kelurahan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) menjadi target dalam pembangunan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Samarinda.

2.1.3 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di lingkungannya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki fungsi utama yaitu :

1. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan.
2. Mendorong partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.
3. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat di wilayahnya.
4. Mengawasi pelaksanaan pembangunan agar sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:20) “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki tugas dalam menyusun rencana pembangunan partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong, dan partisipasi masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan”.

Menurut Cici Krisnawati (2017:5) “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan salah satu dari lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai mitra pemerintah desa mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, melaksanakan, mengendalikan memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif serta memberdayakan masyarakat dan menumbuh kembangkan dinamika masyarakat”.

Menurut Menurut Kriswanto (2023: 754-760) "Lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan."

Menurut pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga kemasyarakatan yang menjadi mitra pemerintah dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengembangan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah, dan membantu peneliti untuk mengatur pemikiran, mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, dan mengarahkan proses analisis secara sistematis.

Menurut Sugiyono (2017: 90) kerangka pikir adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti berdasarkan teori-teori yang relevan, sehingga menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis atau alur penelitian.

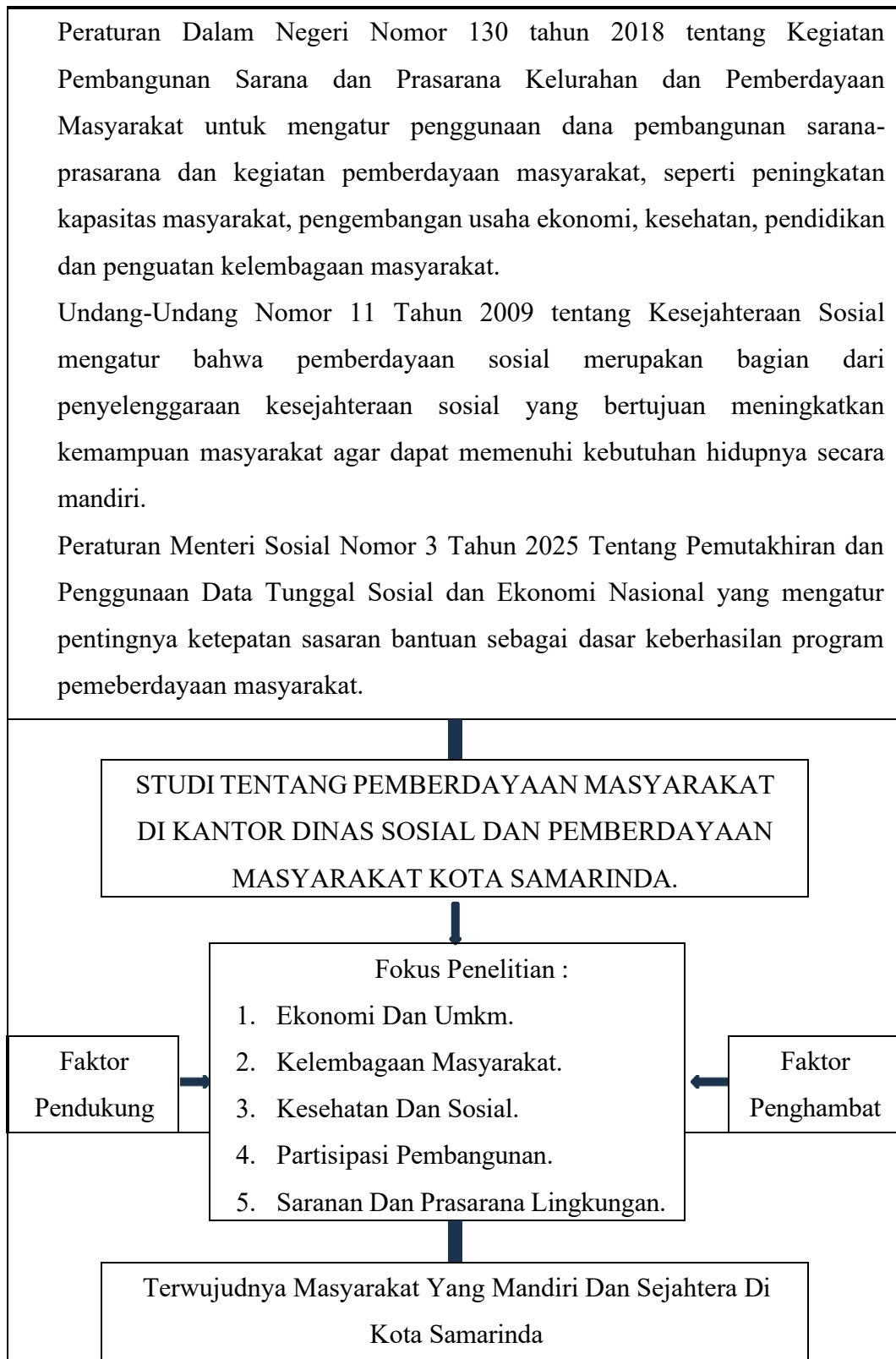
Menurut Herdiansyah (2018: 55) "kerangka pikir adalah alur penalaran yang menggambarkan hubungan logis antara variabel penelitian sehingga mampu menunjukkan arah analisis yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah".

Menurut Lestari (2021: 72) "kerangka pikir merupakan struktur argumentatif

yang menjelaskan bagaimana teori digunakan untuk membaca masalah, menghubungkan variabel, dan merumuskan arah analisis penelitian”.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual berupa alur penalaran yang menghubungkan teori dengan variabel secara logis sehingga membentuk dasar argumentatif yang jelas dalam merumuskan arah analisis, hipotesis, atau langkah penelitian.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian adalah rencana waktu yang disusun secara sistematis untuk mengatur seluruh tahapan penelitian, mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan, agar pelaksanaan penelitian berjalan secara efektif dan terstruktur sampai dengan waktu yang telah ditentukan, proses penelitian dapat berjalan efektif dan sesuai target.

Menurut Sugiyono (2017: 123) "Jadwal penelitian adalah perencanaan waktu yang disusun secara sistematis untuk mengatur setiap tahapan kegiatan penelitian agar dapat dilakukan secara efektif dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan."

Menurut Nazir (2017: 79) "Jadwal penelitian merupakan pedoman waktu yang memuat urutan kegiatan penelitian mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian."

Menurut Arikunto (2019: 61) "Jadwal penelitian adalah pembagian waktu kegiatan penelitian yang disusun secara rinci untuk menghindari keterlambatan serta menjamin keteraturan pelaksanaan kegiatan penelitian."

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa jadwal penelitian adalah rencana waktu yang disusun untuk mengatur sebuah kegiatan agar lebih terstruktur dan sistematis, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Jadwal Penelitian					
		Tahun 2025/2026					
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Mei
1	Observasi						
2	Pengajuan Judul						
3	Penysunan Skripsi						
4	Penelitian Lapangan						
5	Seminar Hasil						
6	Ujian Pendadaran						

Sumber: dibuat oleh peneliti, 2026

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penggolongan atau klasifikasi suatu penelitian berdasarkan pendekatan, tujuan, metode, atau sifat data yang digunakan. Jenis penelitian membantu peneliti menentukan cara terbaik untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, jenis penelitian menggambarkan bentuk atau tipe penelitian yang digunakan dalam suatu studi ilmiah, apakah bersifat kualitatif, kuantitatif, atau campuran (mixed methods), serta apakah penelitian tersebut bersifat deskriptif, eksplanatif, eksperimen, atau tindakan, tergantung dari fokus dan tujuan penelitiannya.

Menurut Widodo (2021: 22) "Jenis penelitian adalah klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan, metode, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian."

Menurut Sujarweni (2020: 11) "Jenis penelitian adalah metode atau pendekatan penelitian yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian."

Menurut Santoso (2020: 33) "Jenis penelitian adalah bentuk penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau menganalisis suatu fenomena sesuai dengan metode yang ditetapkan."

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jenis penelitian sebagai klasifikasi atau bentuk penelitian untuk memperoleh serta menganalisis data, guna menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan suatu penelitian secara sistematis sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3.3 Lokasi Penelitian

Secara umum, lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah di mana kegiatan penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Lokasi ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan objek, fenomena, atau permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain, lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya proses pengumpulan data penelitian, baik secara langsung melalui observasi, wawancara, maupun melalui dokumen dan sumber lainnya.

Menurut Menurut Wiratma Sujarweni (2021: 73) "Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan".

Menurut Moleong (2018: 127) "Menjelaskan bahwa dalam memilih suatu lokasi penelitian diarahkan oleh suatu teori secara empiris yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk data yang bersifat sementara".

Menurut Riduwan (2018: 64) "Lokasi penelitian adalah tempat berlangsungnya proses penelitian, dimana peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung."

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Lokasi penelitian sebagai tempat berlangsungnya kegiatan penelitian yang dipilih secara terencana berdasarkan pertimbangan teoritis dan empiris, yang dimana peneliti melakukan proses pengumpulan data secara langsung untuk memperoleh informasi sementara maupun final yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang peneliti tetapkan adalah di kota Samarinda, Kaimantan Timur. Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan yaitu "Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda".

3.4 Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah penjelasan tentang makna atau pengertian suatu konsep secara teoritis berdasarkan kajian ilmiah atau pendapat para ahli. Definisi ini menjelaskan *apa yang dimaksud* oleh suatu istilah atau variabel dalam konteks penelitian, sehingga peneliti dan pembaca memiliki pemahaman yang sama terhadap konsep yang digunakan. Dengan kata lain, definisi konsepsional

menjelaskan makna suatu istilah dari sudut pandang teori, bukan dari cara pengukurannya di lapangan.

Menurut Kuncoro (2019: 52) "Definisi konsepsional merupakan batasan konsep penelitian yang dirumuskan berdasarkan kajian pustaka dan teori yang relevan."

Menurut Burhan Nurgiyantoro (2018: 21) "Definisi konsepsional merupakan uraian makna suatu konsep penelitian yang disusun secara teoritis agar konsep tersebut dapat dipahami secara tepat."

Menurut Sujarweni (2021: 84) "Definisi konsepsional merupakan penjelasan mengenai pengertian dari suatu variabel penelitian berdasarkan teori atau konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya."

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Definisi konsepsional adalah rumusan batasan dan penjelasan makna suatu konsep atau variabel penelitian yang disusun secara teoritis berdasarkan kajian pustaka yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, sehingga konsep tersebut dapat dipahami secara tepat dan menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian.

Definisi Konsepsional dalam penelitian ini adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang bertujuan memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan daerah.

3.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah *batasan utama* yang ditetapkan peneliti untuk menentukan aspek tertentu dari suatu masalah yang akan diteliti secara mendalam. Fokus penelitian berfungsi untuk memperjelas arah penelitian sehingga peneliti tidak keluar dari konteks yang ingin dikaji.

Menurut Sugiyono (2017: 75) "Fokus penelitian adalah pokok permasalahan atau inti dari fenomena yang akan diteliti, yang menjadi acuan dalam merancang metode, pengumpulan data, dan analisis penelitian. Fokus ini menentukan arah penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan."

Menurut Moleong (2018: 129) "Fokus penelitian adalah pokok permasalahan atau inti dari fenomena yang akan diteliti, yang menjadi acuan dalam merancang metode, pengumpulan data, dan analisis penelitian. Fokus ini menentukan arah penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan".

Menurut Menurut Sujarweni (2021: 76) "Fokus penelitian adalah bagian tertentu dari fenomena yang dijadikan titik perhatian dalam penelitian. Fokus ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi variabel, subjek, dan lingkup penelitian sehingga hasil penelitian lebih spesifik dan mendalam."

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Fokus penelitian adalah pokok permasalahan atau bagian tertentu dari fenomena yang menjadi pusat perhatian peneliti sebagai acuan untuk mengarahkan pengumpulan data, analisis, dan pencapaian tujuan penelitian secara spesifik dan relevan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini didasari pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana program Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut :

1. Fokus utama Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - a) Ekonomi Dan Umkm.
 - b) Kelembagaan Masyarakat.
 - c) Kesehatan Dan Sosial.
 - d) Partisipasi Pembangunan.
 - e) Sarana Dan Prasarana Lingkungan.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat.

3.6 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Sumber data dapat berupa orang, dokumen, arsip, tempat, objek, maupun kejadian yang menjadi bahan untuk dikumpulkan, dianalisis, dan diolah dalam proses penelitian. Secara sederhana, sumber data adalah asal diperolehnya data yang digunakan untuk mendukung suatu penelitian.

Menurut Widodo (2021: 73) "Sumber Data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan dalam suatu penelitian dan dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung oleh peneliti."

Menurut Menurut Zed (2017: 145) "Sumber data adalah asal informasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh fakta, angka, atau keterangan yang mendukung analisis penelitian, baik bersifat primer maupun sekunder."

Menurut Menurut Nazir (2017: 213) ”Sumber data adalah asal informasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh fakta, angka, atau keterangan yang mendukung analisis penelitian, baik bersifat primer maupun sekunder.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sebuah sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memperoleh sebuah fakta, angka, keterangan dalam mendukung analisis penelitian yang dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung yang bersifat primer maupun sekunder.

3.6.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (responden, informan, atau objek penelitian) melalui pengumpulan data secara langsung seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Data ini belum pernah diolah pihak lain, sehingga bersifat asli dan apa adanya.

Menurut Menurut Raco (2018: 105) ” Data primer adalah data yang dikumpulkan pertama kali oleh peneliti dari responden atau objek penelitian menggunakan instrumen tertentu, yang kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian secara langsung.”

Menurut Menurut Sujarweni (2021: 85) “Data primer adalah informasi atau fakta yang dikumpulkan secara langsung dari subjek atau fenomena yang diteliti, baik melalui wawancara, angket, observasi, maupun eksperimen, sehingga akurasi lebih tinggi dibanding data sekunder.”

Menurut Sugiyono (2022:213), “Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh secara

langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau teknik pengumpulan data lainnya yang dilakukan oleh peneliti”.

Untuk mengetahui informan dan *Key Informan* peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* menurut Sugiyono (2022:133) “*Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang mendalam dan akurat”. Pertimbangan tersebut dianggap narasumber utama untuk memberikan informasi yang akurat dalam proses penelitian berlangsung , sehingga hasil penelitian tersebut sesuai dengan apa yang peneliti harapkan. Berikut adalah informan dan *key informan* sebagai narasumber peneliti :

a. *Key Informan*

Ibu Lina Piji Astuti, SSTP selaku Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kota Samarinda.

b. Informan

1. Bapak Syamsul Bahari, S.E selaku Jabatan Fungsional Di Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kota Samarinda.
2. Ibu Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si selaku Sekertaris Di Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kota Samarinda.
3. Ibu Pinkan Ramadanti. S. Tr.IP selaku Jabatan Fungsional Di Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kota Samarinda.
4. Ibu Diyah Ariani, S.E selaku Jabatan Fungsional Di Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kota Samarinda.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber

pertama oleh peneliti, melainkan melalui pihak lain atau dari dokumen yang sudah tersedia. Data ini dapat berupa arsip, laporan, buku, jurnal, instansi pemerintah, atau publikasi resmi.

Menurut Sujarweni (2021: 85) "Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari dokumen, laporan, arsip, atau penelitian sebelumnya, dan digunakan peneliti untuk melengkapi atau membandingkan data primer."

Menurut Creswell (2018: 157) "Data sekunder adalah informasi yang tersedia dalam sumber tertulis atau elektronik yang dikumpulkan sebelumnya, misalnya statistik, dokumen, atau artikel penelitian terdahulu."

Menurut Best & Kahn (2016: 92) "Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti saat ini tetapi diambil dari sumber yang sudah ada, baik untuk analisis sekunder maupun untuk memperkuat data primer."

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber atau pihak lain yang sudah ada sebelumnya, baik berupa dokumen, laporan, arsip, maupun publikasi, yang digunakan peneliti untuk mendukung, melengkapi, atau memperkuat analisis penelitian.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Teknik ini menentukan bagaimana informasi dikumpulkan dari responden, objek, atau sumber data lainnya agar data yang diperoleh valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Ibrahim (2018: 74) "Mengumpulkan data adalah suatu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian".

Menurut Sugiyono (2017: 223) "Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari sumbernya, seperti observasi, wawancara, angket/kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka".

Menurut Moleong (2017: 127) "Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian agar data yang diperoleh lengkap, akurat, dan sistematis".

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti secara sistematis untuk memperoleh informasi dari sumber penelitian agar data yang diperoleh lengkap, akurat, dan relevan untuk dianalisis sesuai tujuan penelitian.

3.7.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan, perilaku, objek, atau fenomena yang terjadi di lapangan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Melalui observasi, peneliti melihat sendiri apa yang sedang berlangsung sehingga data yang diperoleh bersifat faktual, objektif, dan aktual, karena berdasarkan pengalaman langsung tanpa perantara.

Menurut Menurut Creswell (2018: 158) "Observasi adalah metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti melihat, mendengar, dan merekam perilaku atau kejadian secara langsung dalam konteks alami subjek penelitian".

Menurut Hermawan (2019: 136) "Observasi adalah metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara melihat, memahami, serta mencatat secara

sistematis terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang akurat.

Menurut Sugiyono (2017: 225) "Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung objek penelitian, baik secara partisipatif maupun non-partisipatif".

Melalui pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu objek atau subjek sebuah penelitian dalam konteks alaminya, baik secara partisipatif maupun nonpartisipatif, dengan melihat, memahami, serta mencatat secara sistematis perilaku, peristiwa, atau kondisi yang diamati secara akurat dan relevan untuk kepentingan sebuah penelitian.

3.7.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber (informan) untuk memperoleh informasi yang mendalam, akurat, dan relevan dengan tujuan penelitian. Wawancara digunakan untuk memahami pendapat, pengalaman, persepsi, pengetahuan, dan sikap informan terhadap suatu fenomena penelitian.

Menurut Moleong (2017: 186) "Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara."

Menurut Sugiyono (2017: 224) "Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung antara peneliti dan sumber data untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian".

Menurut Raco (2018: 110) “Wawancara adalah teknik memperoleh informasi dengan cara bertanya secara sistematis kepada subjek penelitian agar data yang diperoleh lengkap dan akurat”.

Dari pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden secara sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.7.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, laporan, catatan, foto, rekaman, serta berbagai bentuk data tertulis dan visual lainnya yang menyimpan informasi penting.

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data historis, administratif, maupun fakta yang telah tercatat sehingga dapat memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Menurut Sugiyono (2017: 226) “Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti buku, laporan, catatan, atau artikel.

Menurut Moleong (2017: 130) ”adalah cara memperoleh data melalui dokumen tertulis, gambar, foto, atau rekaman yang berhubungan dengan penelitian, untuk mendapatkan informasi yang relevan”.

Menurut Sujarweni (2021: 88) "Dokumentasi adalah cara memperoleh data melalui dokumen atau arsip yang ada untuk mendukung keabsahan dan kelengkapan informasi penelitian".

Dari pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah Dokumentasi adalah cara memperoleh data melalui dokumen atau arsip yang ada untuk mendukung keabsahan dan kelengkapan informasi penelitian.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, mengorganisasi, menata, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan informasi yang bermakna untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan kata lain, analisis data merupakan usaha sistematis untuk memahami data, menemukan pola, hubungan, atau makna di dalamnya, serta menyajikan temuan yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.

Menurut John W. Creswell & Plano Clark (2018: 189) "Analisis data adalah proses pengelolaan dan pemaknaan data kualitatif maupun kuantitatif yang bertujuan menemukan pola, tema, dan kesimpulan penelitian".

Menurut Nazir (2017: 320) "Analisis data adalah proses memeriksa, menata, dan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan".

Menurut Menurut Raco (2018: 187) "Analisis data adalah proses kritis dalam penelitian untuk menelaah data yang dikumpulkan sehingga dapat menemukan

hubungan, pola, dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian”.

Dari pendapat para ahli di atas mengenai analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa analisis data adalah proses sistematis mengelola, menata, menafsirkan, dan memaknai data kualitatif maupun kuantitatif yang dikumpulkan agar dapat menemukan pola, hubungan, tema, makna, dan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

3.8.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi atau data dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan agar peneliti mendapatkan bahan atau fakta yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dengan kata lain, pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam penelitian untuk menghimpun data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sugiyono (2017: 223) “Pengumpulan data adalah proses memperoleh informasi atau fakta dari sumber penelitian menggunakan teknik tertentu seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau dokumentasi agar data yang diperoleh lengkap dan akurat”. Menurut Moleong (2017: 127) ”Pengumpulan data adalah kegiatan sistematis yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian agar data yang diperoleh dapat dianalisis dan dijadikan dasar pengambilan kesimpulan”.

Menurut Nazir (2017: 215) “Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi dari sumber data, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk dianalisis sesuai tujuan penelitian”.

Dari pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengumpulan data adalah proses sistematis yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi atau fakta dari sumber penelitian menggunakan berbagai teknik agar data yang diperoleh lengkap, akurat, relevan, dan dapat dianalisis untuk menjawab masalah penelitian.

3.8.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengorganisasikan data mentah yang telah diperoleh dari lapangan sehingga menjadi informasi yang lebih terarah dan bermakna. Reduksi data dilakukan untuk menghilangkan data- data yang tidak relevan, sekaligus menata data penting agar dapat dianalisis dengan lebih mudah.

Menurut Sugiyono (2017: 334) “Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemilihan, pemfokusan, dan pengorganisasian data yang diperoleh dari lapangan sehingga informasi penting saja yang disimpan dan dianalisis”.

Menurut Sujarweni (2021: 113) “Reduksi data adalah kegiatan penyaringan, penyederhanaan, dan pengelompokan data agar informasi yang relevan dan signifikan lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan.

Menurut Raco (2018: 188) “Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data penelitian untuk menyingkirkan informasi yang kurang penting dan menyoroti hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian”.

Dari pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengumpulan data adalah reduksi data adalah proses penyaringan, penyederhanaan, pemilihan, dan pengorganisasian data penelitian agar informasi yang relevan, penting, dan

signifikan lebih mudah dianalisis, diinterpretasikan, dan dijadikan dasar penarikan kesimpulan.

3.8.3 Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menampilkan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami sehingga peneliti dapat melihat gambaran keseluruhan data, menemukan pola, hubungan, atau kategori, serta mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan.

Menurut Kusumastuti & Khoiron (2019: 67) "Penyajian data merupakan kegiatan mengorganisasikan data yang telah direduksi kedalam bentuk penyajian yang lebih terstruktur sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memahami suatu data.

Menurut Nazir (2017: 321) "Penyajian data adalah proses mengorganisasi data agar tersusun secara sistematis sehingga memudahkan pembaca melihat pola, hubungan, dan tren informasi".

Moleong (2017: 219) "Penyajian data adalah proses menyusun dan menampilkan data penelitian secara sistematis agar informasi penting dapat terlihat, dianalisis, dan ditarik kesimpulannya".

Menurut pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Penyajian data adalah proses mengorganisasikan, menyusun, dan menampilkan data penelitian yang telah direduksi secara sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi, melihat pola hubungan serta data yang disajikan dalam bentuk analisis dan penarikan kesimpulan secara tepat.

3.8.4 Penarikan Kesimpulan

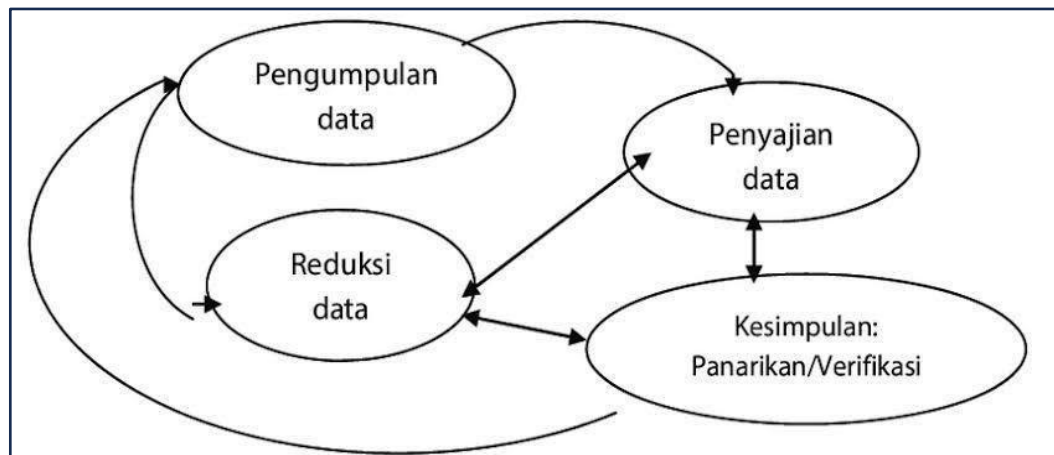
Penarikan atau verifikasi kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data, yaitu proses merumuskan hasil temuan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian melakukan pengecekan kembali (verifikasi) untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan valid, konsisten, dan sesuai dengan data penelitian. Penarikan kesimpulan tidak hanya dilakukan di akhir penelitian, tetapi dimulai sejak awal proses pengumpulan data dan terus dikembangkan seiring bertambahnya informasi. Menurut Sugiyono (2017: 338) “Penarikan kesimpulan adalah proses menafsirkan hasil penelitian setelah data dianalisis untuk menemukan jawaban atas masalah atau hipotesis penelitian”.

Moleong (2017: 221) “Penarikan kesimpulan adalah proses akhir penelitian di mana peneliti membuat keputusan atau generalisasi berdasarkan data yang telah dianalisis agar temuan penelitian dapat dijelaskan secara jelas dan sistematis”.

Menurut Raco (2018: 190) “Penarikan kesimpulan adalah kegiatan membuat ringkasan atau inferensi dari hasil penelitian yang telah dianalisis, sehingga dapat memberikan jawaban atas pertanyaan atau tujuan penelitian”.

Menurut pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penarikan kesimpulan adalah proses akhir penelitian yang dilakukan untuk menafsirkan hasil analisis data, menemukan jawaban atas masalah penelitian, dan menyajikan temuan secara logis, jelas, dan sistematis.

Gambar 3. 1 Analisis Data Model Intreraktif



Sumber: Mathew B. Miles dan Michael Huberman (dalam Sugiyono, 2017:374)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Sosial Kota Samarinda. Pembahasan dalam bab ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui proses penelitian di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

Secara geografis, Kota Samarinda memiliki posisi yang cukup strategis karena menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda juga merupakan ibu kota dari Kalimantan Timur yang terletak di bagian timur Pulau Kalimantan yang dilalui oleh Sungai Mahakam sebagai salah satu jalur transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Secara administratif, Samarinda terbagi menjadi beberapa kecamatan dalam satu wilayah pemerintahan pada tingkat daerah yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik serta pembangunan sosial. Saat ini kota Samarinda memiliki 10 kecamatan yang terdiri dari Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sungai Pinang, Palaran, Sambutan dan Loa Jalan Ilir. Dalam setiap kecamatan tersebut, terbagi lagi ke dalam beberapa kelurahan sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

Luas wilayah Kota Samarinda 718 km² yang didalamnya terdapat 53 desa dengan penduduk mencapai sekitar 928.644 jiwa, dengan 488.583 laki-laki dan 440.061

perempuan dengan pertumbuhan penduduknya mencapai 11% pertahunnya.

Lokasi penelitian ini berada di kantor Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat yang berada di kawasan perkotaan dengan akses jalan utama memudahkan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial, untuk menjangkau lokasi tersebut. Selain itu, keberadaannya yang relatif dekat dengan kantor pemerintahan lainnya juga mendukung terjalinnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Letak yang strategis ini turut mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan aksesibilitas yang baik, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi, pelayanan sosial, serta mengikuti berbagai program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

4.2 Sejarah Singkat Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Kota Samarinda

Pembentukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda tidak terlepas dari perkembangan sistem pemerintahan daerah serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial yang semakin kompleks. Pada awalnya, urusan kesejahteraan sosial di daerah dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang memiliki tugas memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.

Seiring dengan perkembangan pemerintahan daerah setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai membentuk berbagai perangkat daerah yang memiliki

tugas dan fungsi tertentu, termasuk dalam bidang sosial. Di Kota Samarinda, lembaga yang menangani bidang sosial pada awalnya berbentuk Dinas Sosial yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta pembinaan lembaga kesejahteraan sosial.

Dalam perkembangannya, struktur organisasi perangkat daerah mengalami beberapa kali perubahan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai sistem pemerintahan daerah. Salah satu perubahan penting terjadi setelah diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Penataan organisasi perangkat daerah di Kota Samarinda kemudian diatur melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang mengatur pembentukan dan struktur organisasi berbagai dinas daerah, termasuk dinas yang menangani urusan kesejahteraan sosial. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dinas memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, serta beberapa bidang yang bertugas melaksanakan program-program pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, perubahan kembali terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini juga mendorong dilakukannya penataan kembali organisasi perangkat daerah agar lebih efektif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah melakukan penggabungan beberapa urusan yang memiliki keterkaitan fungsi, termasuk urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui proses penataan tersebut, terbentuklah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta pemberdayaan masyarakat. Penggabungan kedua bidang tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta memperkuat kemandirian masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.

Sebagai perangkat daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda memiliki tugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas ini memiliki berbagai fungsi, antara lain perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pelaksanaan program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, dinas ini juga berperan dalam menangani berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, korban bencana sosial, serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda juga bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial, organisasi masyarakat, serta instansi pemerintah lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, dinas ini berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan, serta pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, keberadaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di daerah. Melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, dinas ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

4.3 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat secara umum mengacu pada kebijakan pemerintah daerah serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan sosial di daerah.

4.3.1 Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pembinaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

- a) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas dengan posisi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.
- b) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas dengan posisi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.

4.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki beberapa fungsi, antara lain :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan sosial, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan bagi kelompok rentan.
- c) Pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, serta penguatan potensi masyarakat agar mandiri.
- d) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial.
- e) Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

- f) Pengelolaan data dan informasi kesejahteraan sosial sebagai dasar perencanaan program.
- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

4.3 Visi Dan Misi

Visi dan misi merupakan konsep penting dalam suatu organisasi atau lembaga, di mana visi adalah gambaran atau cita-cita yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan misi merupakan langkah-langkah atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.

4.3.1 Visi

Secara umum visi menggambarkan cita-cita, harapan, dan kondisi ideal yang ingin diwujudkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya visi, suatu organisasi memiliki arah yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu “Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat menuju keberdayaan dan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).”

4.3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian PMKS.
2. Meningkatkan partisipasi PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

3. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan PMKS.
4. Menyediakan data dan informasi pembangunan kesejahteraan sosial.

4.4 Keadaan Sumber Daya Manusia

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Jumlah Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, per 02 Januari 2026, Total 65 jiwa, terdiri atas :

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Data PNS dan Non PNS Dinsos Kota Samarinda

No	Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1.	PNS	13	20	33
2.	PPPK Penuh Waktu	1	4	5
3.	PPPK Paruh Waktu	11	15	26
4.	PTTB	1	-	1

Sumber Data: Profil Dinas Sosial Kota Samarinda, 2024

4.5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Sosial Kota Samarinda, adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Samarinda sebagai berikut :

4.6 Penyajian Data Dan Hasil Penelitian

Penyajian data dan hasil penelitian merupakan bagian yang berisi uraian mengenai data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di lapangan. Data tersebut diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda. Penyajian data bertujuan untuk menggambarkan secara jelas kondisi yang terjadi di lapangan terkait dengan fokus penelitian.

4.6.1 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi Dan Umkm

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat pada bidang Ekonomi dan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan *Key Informan* dan Informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa saja program Pemberdayaan Masyarakat pada bidang ekonomi dan UMKM yang dilaksanakan ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Program yang dilaksanakan meliputi pelatihan kewirausahaan, bantuan peralatan usaha, pengembangan usaha mikro, serta pembinaan dan pendampingan UMKM”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

"Program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi dan UMKM yang kami laksanakan antara lain pelatihan keterampilan usaha, pelatihan pengolahan produk makanan dan minuman, serta pendampingan bagi pelaku UMKM. Selain itu, kami juga memberikan bantuan peralatan usaha kepada kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan agar usaha mereka dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan keluarga". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

"Di wilayah kami, program yang sering dilaksanakan meliputi pelatihan kewirausahaan, bantuan modal atau sarana usaha melalui program pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan kelompok usaha masyarakat. Program tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan sekitar." (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

"Saya pernah mengikuti program pelatihan UMKM yang diselenggarakan pemerintah. Dalam kegiatan tersebut kami diberikan materi mengenai pengelolaan usaha, pemasaran produk, dan pengemasan yang lebih menarik. Selain pelatihan, beberapa pelaku usaha juga memperoleh bantuan peralatan yang membantu meningkatkan produksi usaha kami".

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti, S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

"Program pemberdayaan yang saya ketahui di bidang ekonomi dan UMKM meliputi pelatihan keterampilan kerja, pengembangan usaha kecil, serta

dukungan pemasaran produk lokal melalui berbagai kegiatan pameran atau bazar. Program-program tersebut cukup membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka."

2. Siapa saja masyarakat atau pelaku UMKM yang menjadi sasaran program ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

"Sasaran program pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi dan UMKM adalah masyarakat yang memiliki usaha mikro dan usaha kecil, kelompok usaha bersama, serta warga yang memiliki potensi untuk memulai usaha. Kami juga memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

"Program ini ditujukan kepada pelaku UMKM yang sudah menjalankan usaha maupun masyarakat yang ingin memulai usaha baru. Selain itu, kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok masyarakat produktif lainnya juga menjadi sasaran karena mereka memiliki potensi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di lingkungan kelurahan". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

"Berdasarkan pengalaman saya, peserta program berasal dari berbagai jenis usaha kecil seperti usaha kuliner, kerajinan, perdagangan, dan jasa. Tidak hanya pelaku usaha yang sudah berjalan, masyarakat yang baru merintis usaha juga diberikan kesempatan untuk mengikuti program tersebut". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

"Menurut saya, sasaran program ini cukup luas, yaitu masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan pendapatan, termasuk pelaku UMKM, ibu rumah tangga yang memiliki usaha rumahan, kelompok usaha masyarakat, serta warga yang memiliki keterampilan tetapi belum memiliki usaha yang berkembang". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

"Sasaran program pemberdayaan ini tidak hanya pelaku UMKM yang sudah memiliki usaha, tetapi juga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap namun mempunyai keinginan untuk berwirausaha. Selain itu, kelompok usaha bersama, pemuda produktif, dan masyarakat yang tergolong kurang mampu juga menjadi prioritas penerima program agar dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan keluarga mereka". (Wawancara 9 Maret 2026)

3. Mengapa program ekonomi dan UMKM tersebut perlu dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

"Program ekonomi dan UMKM perlu dilaksanakan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pendapatan. Melalui pelatihan, pendampingan, serta bantuan yang diberikan, kami berharap masyarakat dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat

mengatakan bahwa :

"Menurut saya, program ini penting karena dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di masyarakat sekaligus membantu pelaku UMKM yang sudah berjalan agar dapat berkembang. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk berwirausaha dan mengurangi angka pengangguran di lingkungan sekitar". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

"Program ini sangat diperlukan karena tidak semua pelaku UMKM memiliki pengetahuan tentang pengelolaan usaha, pemasaran, maupun pengembangan produk. Melalui program yang diberikan pemerintah, kami memperoleh ilmu, pendampingan, dan fasilitas yang dapat membantu meningkatkan kualitas usaha serta daya saing produk". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

"Program ekonomi dan UMKM perlu dilaksanakan karena dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki usaha yang berkembang, maka pendapatan keluarga akan meningkat, kesempatan kerja bertambah, dan kondisi ekonomi di lingkungan juga menjadi lebih baik". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

"Saya menilai program ini penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi usaha yang produktif. Selain meningkatkan keterampilan dan pendapatan, program ini juga membantu masyarakat agar tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi mampu menciptakan sumber penghasilan secara mandiri". (Wawancara 9 Maret 2026)

4. Bagaimana proses pelaksanaan dan pemberdayaan UMKM dilakukan ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

"Proses pelaksanaan pemberdayaan UMKM diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui usulan dari kelurahan maupun hasil pendataan di lapangan. Setelah itu, kami menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan, seperti pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bantuan usaha. Selama program berlangsung, kami juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

"Pelaksanaan pemberdayaan UMKM dimulai dari proses pendataan calon peserta yang memenuhi kriteria program. Selanjutnya dilakukan sosialisasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian peserta mengikuti pelatihan dan pendampingan sesuai bidang usahanya. Setelah kegiatan selesai, kami tetap melakukan pembinaan agar perkembangan usaha peserta dapat dipantau secara berkelanjutan." (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

"Dalam pelaksanaannya, kami terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan lembaga masyarakat untuk menentukan sasaran program. Setelah itu dilaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas, pemberian materi mengenai pengelolaan usaha, hingga pendampingan dalam penerapan hasil pelatihan. Kami juga memberikan masukan kepada pelaku UMKM apabila ditemukan kendala dalam menjalankan usahanya". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan

Masyarakat mengatakan bahwa :

"Pemberdayaan UMKM dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pada tahap perencanaan kami mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat, kemudian menyusun kegiatan yang relevan. Selanjutnya dilakukan pelatihan, fasilitasi sarana usaha apabila tersedia dalam program, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan untuk mengetahui efektivitas program". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti.

S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayaan

Masyarakat mengatakan bahwa :

"Proses pemberdayaan UMKM tidak hanya berhenti pada pelaksanaan pelatihan. Setelah peserta memperoleh materi dan keterampilan, kami melakukan pendampingan agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pengembangan usaha. Selain itu, kami berkoordinasi dengan perangkat kelurahan dan instansi terkait untuk mendukung keberlanjutan program sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang". (Wawancara 9 Maret 2026)

4.6.2 Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat karena berperan sebagai wadah yang mengorganisasi, mengoordinasikan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dalam memperkuat kelembagaan masyarakat lewat pertanyaan berikut ini :

1. Apa bentuk kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat yang dilakukan?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Bentuk kegiatan yang kami lakukan meliputi pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, PKK, Karang Taruna, serta lembaga kemasyarakatan lainnya. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan koordinasi agar kelembagaan tersebut mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mendukung pembangunan di tingkat kelurahan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“Kami memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada pengurus lembaga masyarakat mengenai tata kelola organisasi, penyusunan administrasi, serta pelaksanaan program kerja. Selain itu, kami juga memfasilitasi koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan kegiatan di masyarakat menjadi lebih efektif”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Penguatan kelembagaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kepemimpinan, manajemen organisasi, serta pemahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Harapannya, setiap lembaga mampu bekerja secara profesional dan mandiri”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Kami juga memfasilitasi forum komunikasi dan rapat koordinasi antara pemerintah, kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan. Melalui kegiatan tersebut, berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat dapat dibahas bersama sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan program pemberdayaan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan

Masyarakat mengatakan bahwa :

“Selain pembinaan dan pelatihan, kami melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja lembaga masyarakat. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan arahan, perbaikan, dan rekomendasi agar kelembagaan masyarakat semakin aktif, tertib administrasi, dan mampu berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”. (Wawancara 9 Maret 2026)

2. Siapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pembinaan kelembagaan masyarakat ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan dan pembinaan kelembagaan masyarakat, pihak yang terlibat tidak hanya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, tetapi juga pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta pengurus lembaga kemasyarakatan seperti LPM, RT, PKK, Karang Taruna, dan lembaga lainnya. Seluruh pihak tersebut memiliki peran masing-masing agar pembinaan berjalan secara berkesinambungan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“Pengelolaan kelembagaan masyarakat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan pihak kecamatan, kelurahan, serta seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan. Kolaborasi ini penting agar setiap program dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam pelaksanaannya kami juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sebagai mitra pemerintah. Mereka membantu menyampaikan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembinaan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Kami berperan sebagai fasilitator dengan menghubungkan berbagai pihak, mulai dari perangkat kelurahan, pengurus LPM, RT, PKK, Karang Taruna, hingga kelompok masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Selain melakukan pembinaan, kami juga menjalin koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih terarah. Dukungan dari masyarakat sendiri menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembinaan tersebut”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti, S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Kami berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan keterlibatan semua pihak, pembinaan kelembagaan dapat berlangsung lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat”. (Wawancara 9 Maret 2026)

3. Mengapa penguatan kelembagaan masyarakat diperlukan ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Penguatan kelembagaan masyarakat sangat diperlukan karena lembaga kemasyarakatan merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kelembagaan yang kuat, setiap program dapat berjalan lebih terarah, partisipasi masyarakat meningkat, serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

”Penguatan kelembagaan diperlukan agar pengurus lembaga masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola organisasi, menyusun program kerja, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas serta fungsinya. Dengan demikian, lembaga dapat bekerja lebih mandiri dan bertanggung jawab”.
(Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Menurut kami, penguatan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam organisasi masyarakat. Melalui pembinaan dan pelatihan, pengurus akan lebih memahami perannya sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pembangunan di lingkungan masing-masing”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Penguatan kelembagaan penting karena dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika kelembagaan berjalan dengan baik, penyampaian informasi, pelaksanaan program, serta penyelesaian berbagai

permasalahan di masyarakat akan menjadi lebih cepat dan efektif”.

(Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti.

S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional di Kantor Pemberdayaan

Masyarakat mengatakan bahwa :

“Penguatan kelembagaan diperlukan agar lembaga masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan program-program pemberdayaan. Dengan kelembagaan yang aktif dan tertib, masyarakat akan lebih mudah dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat kelurahan”.

(Wawancara 9 Maret 2026)

4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti,

SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan

bahwa:

“Upaya yang kami lakukan dimulai dengan memberikan pembinaan secara berkala kepada pengurus lembaga kemasyarakatan. Selain itu, kami menyelenggarakan pelatihan mengenai kepemimpinan, manajemen organisasi, penyusunan program kerja, dan administrasi kelembagaan. Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi agar hasil pembinaan dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas di masyarakat”.

(Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri,

S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat

mengatakan bahwa :

“Kami memberikan pendampingan langsung kepada pengurus lembaga masyarakat, terutama dalam menyusun administrasi organisasi, membuat laporan kegiatan, serta merencanakan program kerja. Pendampingan ini dilakukan agar pengurus lebih memahami tugas dan mampu mengelola organisasi secara tertib dan mandiri”.

(Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

”Salah satu upaya yang kami lakukan adalah memfasilitasi forum koordinasi dan diskusi antara pemerintah, kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan. Melalui forum tersebut, pengurus dapat saling berbagi pengalaman, menyampaikan kendala yang dihadapi, serta memperoleh solusi dan arahan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Kami berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan memberikan sosialisasi mengenai regulasi, tugas, dan fungsi lembaga kemasyarakatan. Selain itu, kami mendorong pengurus agar lebih aktif mengikuti kegiatan pembinaan sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Selain pelatihan dan pembinaan, kami juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaga masyarakat. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan masukan untuk perbaikan ke depan. Kami juga terus membangun komunikasi yang baik dengan pengurus lembaga agar setiap permasalahan dapat segera ditindaklanjuti dan kapasitas organisasi terus meningkat”. (Wawancara 9 Maret 2026)

4.6.3 Kesehatan Dan Sosial

Kesehatan dan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial. Melalui berbagai program dan kegiatan di bidang kesehatan

dan sosial, pemerintah berupaya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa program kesehatan dan sosial yang telah dilaksanakan ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa:

"Program kesehatan dan sosial yang telah dilaksanakan mencakup berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui dukungan terhadap Posyandu, Posbindu, serta kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Di bidang sosial, kami juga memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelompok rentan, serta mendorong pelaksanaan kegiatan sosial berbasis partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

"Kami mendukung pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat seperti pembinaan kader Posyandu, kegiatan kebersihan lingkungan, dan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, terdapat kegiatan sosial berupa gotong royong, bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan". (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

"Program yang telah berjalan antara lain pemberian dukungan terhadap kegiatan Posyandu, pembinaan kader kesehatan, serta pelaksanaan penyuluhan mengenai kesehatan keluarga. Di bidang sosial, kami

memfasilitasi kegiatan yang bertujuan memperkuat kepedulian masyarakat, seperti bakti sosial dan kegiatan yang melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam membantu warga yang membutuhkan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Kami melaksanakan berbagai program yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui dukungan terhadap fasilitas kesehatan berbasis masyarakat dan pemberdayaan kader kesehatan. Sementara di bidang sosial, kami mendukung kegiatan yang mempererat solidaritas masyarakat, termasuk pembinaan kelompok masyarakat dan kegiatan sosial yang dilaksanakan secara swadaya maupun melalui program pemerintah”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Program kesehatan dan sosial dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap kelurahan. Kegiatannya meliputi dukungan terhadap pelayanan Posyandu, peningkatan kapasitas kader kesehatan, penyuluhan kesehatan, serta kegiatan sosial yang mendorong partisipasi masyarakat dalam membantu kelompok rentan, menjaga kebersihan lingkungan, dan memperkuat kepedulian sosial antarwarga”. (Wawancara 9 Maret 2026)

2. Siapa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program kesehatan dan sosial ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Sasaran program kesehatan dan sosial meliputi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, seperti balita, ibu hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, keluarga kurang mampu, serta kelompok rentan lainnya. Program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di setiap kelurahan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

”Dalam pelaksanaannya, program lebih banyak menasar keluarga yang membutuhkan dukungan sosial, kader Posyandu, ibu dan anak, serta masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Kami juga melibatkan masyarakat umum agar program yang dilaksanakan dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi bersama”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Kelompok sasaran ditentukan berdasarkan hasil pendataan dan usulan dari kelurahan. Umumnya meliputi balita, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, keluarga prasejahtera, serta masyarakat yang memerlukan pendampingan dalam bidang kesehatan maupun sosial”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Program kesehatan dan sosial diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi, seperti anak-anak, lansia, keluarga miskin, serta warga yang membutuhkan pelayanan sosial. Selain itu, kader kesehatan dan pengurus lembaga kemasyarakatan juga menjadi sasaran pembinaan agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Pada dasarnya seluruh masyarakat dapat menjadi sasaran program kesehatan dan sosial. Namun, pelaksanaannya diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan, seperti keluarga kurang mampu, balita, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang mengalami permasalahan sosial. Penentuan sasaran dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kelurahan dan berdasarkan kondisi di lapangan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

3. Mengapa program kesehatan dan sosial perlu diberikan kepada masyarakat ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Program kesehatan dan sosial perlu diberikan karena merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kesejahteraan sosial, serta dukungan bagi kelompok rentan. Dengan kondisi masyarakat yang sehat dan sejahtera, pelaksanaan pembangunan juga akan berjalan lebih optimal”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“Program ini penting karena masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pendampingan, baik dalam bidang kesehatan maupun sosial. Melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pelayanan, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, sekaligus memperoleh dukungan ketika menghadapi permasalahan sosial”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Menurut kami, program kesehatan dan sosial bertujuan untuk mencegah munculnya berbagai permasalahan di masyarakat. Dengan adanya penyuluhan, pembinaan, dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih mandiri, memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta mampu

menjaga kondisi kesehatan keluarga”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Program kesehatan dan sosial diperlukan agar seluruh masyarakat, terutama kelompok yang rentan, memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan. Selain itu, program ini juga mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi antarwarga”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Program kesehatan dan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus sarana pemberdayaan. Melalui program tersebut, masyarakat tidak hanya menerima manfaat berupa pelayanan, tetapi juga didorong untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kesehatan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan membantu sesama. Dengan demikian, pembangunan sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

4. Bagaimana pelaksanaan dan manfaat program kesehatan dan sosial bagi masyarakat ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan program kesehatan dan sosial dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, kader kesehatan, serta lembaga kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembinaan Posyandu, penyuluhan kesehatan, dan kegiatan sosial di lingkungan kelurahan. Manfaatnya adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, tumbuhnya kepedulian sosial, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan lingkungan”. (wawancara 9 Maret 2026).

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan program diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kegiatan bersama pihak kelurahan dan lembaga masyarakat. Setelah itu dilakukan sosialisasi, pembinaan, serta pendampingan kepada masyarakat. Dari kegiatan tersebut, masyarakat menjadi lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan, memanfaatkan layanan yang tersedia, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama” (Wawancara 9 Maret 2026).

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Program kesehatan dan sosial dilaksanakan secara bertahap melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kader Posyandu, PKK, dan pemerintah kelurahan. Kami juga melakukan pemantauan agar kegiatan berjalan sesuai rencana. Manfaat yang dirasakan masyarakat adalah meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan, bertambahnya kepedulian sosial, serta terbentuknya kerja sama yang lebih baik antarwarga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaannya, kami memberikan pembinaan, penyuluhan, dan fasilitasi terhadap berbagai kegiatan kesehatan dan sosial di tingkat kelurahan. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat secara langsung sehingga pelaksanaannya lebih efektif. Manfaatnya terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, bertambahnya partisipasi dalam kegiatan sosial, serta semakin kuatnya solidaritas antarwarga”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan

Masyarakat mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana masyarakat ikut terlibat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Kami berperan sebagai fasilitator dan pendamping agar setiap kegiatan berjalan dengan baik. Melalui pelaksanaan tersebut, masyarakat memperoleh manfaat berupa peningkatan kualitas kesehatan, bertambahnya pengetahuan dan keterampilan, serta tumbuhnya rasa tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat, peduli, dan sejahtera”. (Wawancara 9 Maret 2026)

4.6.4 Partisipasi Pembangunan

Partisipasi pembangunan merupakan salah satu unsur penting dalam pemberdayaan masyarakat karena menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai subjek pembangunan yang turut menentukan keberhasilan program yang dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Masyarakat menyampaikan usulan program melalui forum musyawarah, ikut bergotong royong dalam pelaksanaan kegiatan, serta turut mengawasi agar pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi lingkungan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat

mengatakan bahwa :

“Bentuk partisipasi yang paling sering kami temui adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan musyawarah di tingkat RT maupun kelurahan. Selain memberikan usulan, masyarakat juga berperan dalam pelaksanaan kegiatan melalui kerja bakti, swadaya tenaga, maupun dukungan pemikiran sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan baik”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Masyarakat berpartisipasi dengan menjadi anggota atau pengurus lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan RT. Melalui lembaga tersebut, masyarakat ikut menyusun rencana kegiatan, melaksanakan program pemberdayaan, serta membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi yang ada di lingkungan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk tenaga, tetapi juga berupa sumbangan ide, pemikiran, serta dukungan terhadap program pemerintah. Kami melihat masyarakat cukup aktif mengikuti kegiatan penyuluhan, kerja bakti, kegiatan sosial, dan berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Menurut kami, bentuk partisipasi masyarakat terlihat dari kesediaan warga untuk terlibat secara langsung dalam proses pembangunan, baik melalui kehadiran dalam forum perencanaan, pelaksanaan kegiatan secara gotong royong, maupun menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan keterlibatan tersebut, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan pembangunan di lingkungannya”. (Wawancara 9 Maret 2026)

2. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan di lingkungan masyarakat?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Proses pembangunan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga. Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila seluruh unsur tersebut berkolaborasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pembangunan, pihak yang terlibat tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat secara langsung. Kami selalu berkoordinasi dengan kelurahan, pengurus RT, LPM, kader PKK, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat agar setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat dilibatkan, mulai dari perangkat kelurahan, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga kelompok perempuan dan masyarakat umum. Keterlibatan semua pihak sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang partisipatif.”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Kami mendorong agar seluruh pemangku kepentingan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Selain pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, masyarakat sebagai penerima manfaat juga harus terlibat dalam memberikan usulan, mendukung pelaksanaan kegiatan, serta ikut mengawasi hasil pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan lingkungan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti.

S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional di Kantor Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Pihak yang terlibat meliputi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah kecamatan dan kelurahan, LPM, RT, PKK, Karang Taruna, kader-kader masyarakat, serta seluruh warga. Masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari menyampaikan aspirasi, melaksanakan kegiatan, hingga menjaga dan memelihara hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

3. Mengapa partisipasi masyarakat penting dalam pembangunan ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat sangat penting karena masyarakat merupakan subjek sekaligus penerima manfaat pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, program yang dilaksanakan akan lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih baik. Selain itu, partisipasi juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamsul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“Menurut kami, pembangunan tidak akan berjalan secara optimal tanpa dukungan masyarakat. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, memberikan masukan, serta membantu pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut membuat pembangunan menjadi lebih

efektif karena benar-benar didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat diperlukan agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap setiap program yang dilaksanakan. Ketika masyarakat ikut terlibat, mereka akan lebih peduli dalam menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkan hasil pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Keterlibatan masyarakat sangat penting karena pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan sendiri. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan warga, setiap permasalahan di lingkungan dapat diidentifikasi lebih cepat, kemudian dicarikan solusi melalui musyawarah dan pelaksanaan program secara bersama-sama”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan karena masyarakat lebih memahami potensi dan permasalahan yang ada di lingkungannya. Oleh sebab itu, keterlibatan mereka dalam memberikan usulan, mengikuti kegiatan, serta mengawasi pelaksanaan program akan meningkatkan kualitas pembangunan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat”. (Wawancara 9 Maret 2026)

4. Bagaimana cara masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti,

SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat berpartisipasi sejak tahap perencanaan dengan menyampaikan aspirasi dan usulan melalui musyawarah di tingkat RT, kelurahan, maupun forum perencanaan pembangunan. Setelah program ditetapkan, masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan melalui gotong royong, swadaya, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang telah disepakati”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat dimulai dengan menghadiri rapat atau musyawarah yang diselenggarakan di lingkungan kelurahan maupun RT. Dalam forum tersebut masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat ikut memberikan tenaga, pemikiran, maupun dukungan lainnya agar kegiatan dapat berjalan dengan baik”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Kami mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan masukan melalui lembaga kemasyarakatan seperti LPM, RT, PKK, dan Karang Taruna. Setelah usulan menjadi program, masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, baik sebagai panitia, relawan, maupun peserta yang ikut mendukung keberhasilan pembangunan di lingkungan masing-masing”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan ide dan usulan mengenai kebutuhan lingkungan, kemudian ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan secara gotong royong. Selain itu, masyarakat juga berperan melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan serta memberikan

masuk sebagai bahan evaluasi agar program berikutnya menjadi lebih baik”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti.

S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat dilakukan melalui keterlibatan aktif pada setiap tahapan pembangunan. Mereka mengikuti musyawarah untuk menentukan prioritas kegiatan, membantu pelaksanaan program sesuai kemampuan masing-masing, menjaga hasil pembangunan yang telah selesai, serta memberikan saran dan evaluasi kepada pemerintah agar pembangunan berikutnya semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. (Wawancara 9 Maret 2026)

4.6.5 Sarana Dan Prasarana Lingkungan

Sarana dan prasarana lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat karena berperan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang layak, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Penyediaan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana, seperti jalan lingkungan, drainase, fasilitas umum, sanitasi, dan infrastruktur pendukung lainnya, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja sarana dan prasarana lingkungan yang telah dibangun atau diperbaiki?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana yang telah dibangun maupun diperbaiki disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing kelurahan. Beberapa di antaranya meliputi perbaikan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan

umum, rehabilitasi Posyandu, balai pertemuan warga, serta fasilitas umum lainnya yang mendukung aktivitas masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan usulan masyarakat melalui mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“Berdasarkan usulan masyarakat, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, tempat pembuangan sampah sementara, serta fasilitas pendukung kegiatan masyarakat seperti Posyandu dan balai warga. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas lingkungan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Kami memfasilitasi pembangunan sarana yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat, seperti perbaikan drainase, jalan setapak, penerangan jalan lingkungan, serta rehabilitasi fasilitas umum. Selain pembangunan fisik, juga dilakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang sudah ada agar tetap dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana yang telah direalisasikan meliputi perbaikan fasilitas lingkungan, pembangunan tempat kegiatan masyarakat, peningkatan kualitas drainase, serta penyediaan sarana penunjang kebersihan lingkungan. Jenis kegiatan disesuaikan dengan hasil musyawarah dan kebutuhan yang diusulkan oleh masyarakat di masing-masing wilayah”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti, S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan

Masyarakat mengatakan bahwa :

“Pembangunan yang telah dilakukan mencakup berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat, seperti jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, balai pertemuan warga, Posyandu, serta sarana kebersihan lingkungan. Keberadaan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan, kenyamanan, keamanan, dan kualitas hidup masyarakat di lingkungan kelurahan” (Wawancara 9 Maret 2026)

2. Di mana lokasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Lokasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan tersebar di berbagai kelurahan di Kota Samarinda. Penentuan lokasi didasarkan pada hasil musyawarah masyarakat, usulan dari kelurahan, serta hasil verifikasi terhadap kebutuhan yang dianggap paling prioritas. Dengan demikian, pembangunan benar-benar diarahkan pada wilayah yang membutuhkan peningkatan fasilitas lingkungan’. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“Pembangunan dilaksanakan di lingkungan RT dan kelurahan yang telah mengusulkan kegiatan melalui mekanisme perencanaan. Umumnya lokasi dipilih berdasarkan kondisi sarana yang sudah tidak layak atau wilayah yang masih membutuhkan fasilitas penunjang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Lokasi pembangunan tidak ditetapkan secara sepihak, tetapi berdasarkan hasil survei lapangan dan usulan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan dapat dilakukan di kawasan permukiman, fasilitas umum, Posyandu, balai warga, jalan lingkungan, maupun titik-titik lain yang menjadi prioritas di masing-masing kelurahan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pembangunan dilakukan pada lokasi yang telah disepakati bersama melalui musyawarah antara masyarakat, RT, LPM, dan pemerintah kelurahan. Biasanya lokasi tersebut merupakan area yang sering digunakan masyarakat atau memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap perbaikan infrastruktur lingkungan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dilaksanakan di berbagai titik sesuai dengan usulan yang masuk dan hasil verifikasi di lapangan. Fokusnya berada pada wilayah yang membutuhkan peningkatan akses, kenyamanan, dan pelayanan masyarakat, seperti jalan lingkungan, drainase, kawasan permukiman, fasilitas kesehatan berbasis masyarakat, serta sarana umum lainnya di tingkat kelurahan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

3. Mengapa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan diperlukan ?

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang mengatakan bahwa :

“Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan sangat diperlukan karena merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan sehat. Selain itu, pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata yang disampaikan masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“Pembangunan diperlukan karena masih terdapat beberapa fasilitas lingkungan yang mengalami kerusakan atau belum memadai. Dengan adanya perbaikan maupun pembangunan baru, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, aman, dan efisien, sekaligus mendukung kelancaran berbagai kegiatan kemasyarakatan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Menurut kami, pembangunan sarana dan prasarana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Infrastruktur yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga mendukung kegiatan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga pembangunan di lingkungan dapat berjalan lebih optimal”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Pembangunan sarana dan prasarana diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, seperti jalan yang rusak, saluran drainase yang kurang baik, maupun keterbatasan fasilitas umum. Dengan tersedianya infrastruktur yang layak, masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung melalui meningkatnya kenyamanan, kebersihan, dan keselamatan lingkungan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar akses pelayanan publik, memperkuat interaksi sosial, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata. Oleh karena itu, pembangunan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

4. Bagaimana proses pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dilakukan ?

Berikut Hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan :

“Proses pembangunan diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah di tingkat RT dan kelurahan. Usulan tersebut kemudian diverifikasi dan disesuaikan dengan skala prioritas serta anggaran yang tersedia. Setelah pembangunan selesai, dilakukan monitoring dan evaluasi, sedangkan pemeliharaan dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat agar sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pembangunan dimulai dari usulan masyarakat yang disampaikan melalui forum musyawarah. Setelah disetujui, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan pengawasan selama proses pembangunan. Setelah fasilitas selesai dibangun, masyarakat bersama pengurus RT dan kelurahan diharapkan ikut menjaga dan melakukan pemeliharaan agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Kami melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi dan kebutuhan masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar pekerjaan berjalan sesuai rencana. Untuk pemeliharaan, kami mendorong adanya partisipasi masyarakat melalui kegiatan gotong royong dan pelaporan apabila terdapat kerusakan pada fasilitas yang telah dibangun”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan

Masyarakat mengatakan bahwa :

“Proses pembangunan dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan, verifikasi usulan, pelaksanaan pekerjaan, hingga evaluasi hasil pembangunan. Setelah fasilitas digunakan oleh masyarakat, pemeliharaan dilakukan secara bersama-sama melalui kerja sama antara pemerintah, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan warga agar kondisi sarana tetap layak digunakan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti.

S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayaan

Masyarakat mengatakan bahwa :

“Pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati dalam musyawarah masyarakat dan disesuaikan dengan program yang tersedia. Selama pelaksanaan, kami melakukan pendampingan dan pemantauan agar pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Setelah pembangunan selesai, masyarakat diberikan tanggung jawab untuk ikut menjaga dan merawat fasilitas tersebut, sedangkan pemerintah tetap melakukan monitoring serta perbaikan apabila ditemukan kerusakan yang memerlukan penanganan lebih lanjut”. (Wawancara 9 Maret 2026)

4.6.5 Faktor Pendukung Dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Berikut Hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti,

SSTP selaku KABID pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan :

“Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa faktor yang sangat mendukung keberhasilan program. Salah satunya adalah adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah, ketersediaan anggaran, serta partisipasi aktif masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, dan kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah, kelurahan, dan masyarakat juga menjadi faktor penting”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri,

S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat

mengatakan bahwa :

“Menurut saya, keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat didukung oleh kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga. Ketika komunikasi berjalan lancar, pelaksanaan program menjadi lebih mudah karena masyarakat memahami tujuan kegiatan”. (Wawancara 9 Maret 2026).

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah tersedianya program-program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta adanya dukungan dari aparatur kelurahan dan lembaga kemasyarakatan”. (Wawancara 9 Maret 2026).

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Saya melihat bahwa antusiasme masyarakat yang cukup tinggi pada beberapa kegiatan menjadi faktor pendukung utama karena mempermudah proses pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi antarbidang dan kerja sama lintas sektor juga sangat membantu”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat menurut saya adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah melalui berbagai program pemberdayaan, pendampingan kepada masyarakat, serta peran aktif lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

2. Faktor Penghambat

Berikut Hasil wawancara peneliti bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku KABID pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan :

“Di balik faktor pendukung terdapat penghambat dalam program tersebut

seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan, serta perbedaan kemampuan sumber daya manusia di setiap wilayah sehingga pelaksanaan program belum merata”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Bapak Syamssul Bahri, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat mengatakan bahwa :

“kendala yang masih kami ditemui yaitu kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dan masih terbatasnya pemahaman mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional di pemberdayaan masyarakat Kota Samarinda mengatakan bahwa :

“Sedangkan faktor penghambat yang sering muncul yaitu perubahan jadwal kegiatan akibat kondisi tertentu, keterbatasan fasilitas pendukung, dan masih adanya sebagian masyarakat yang memiliki kesibukan sehingga kehadirannya dalam kegiatan belum optimal”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si yang menjabat sebagai Sekertaris dikantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, kondisi geografis pada beberapa wilayah, serta belum

meratanya kapasitas masyarakat dalam mengelola hasil dari program pemberdayaan yang telah diberikan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

Berikut hasil wawancara peneliti bersama *Informan* Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa :

“Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun tenaga pendamping, serta masih adanya perbedaan tingkat partisipasi dan kesiapan masyarakat dalam menerima maupun menjalankan program yang telah direncanakan”. (Wawancara 9 Maret 2026)

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bersama *Key Informan* dan *Informan* yang telah dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian tentang Peraturan Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatur penggunaan dana pembangunan sarana-prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan penguatan kelembagaan masyarakat. Berikut peneliti menjelaskan, menyimpulkan dan melampirkan hasil penelitian :

1. Ekonomi Dan Umkm

Pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kemampuan ekonomi

secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berperan sebagai fasilitator yang memberikan pembinaan, pelatihan, pendampingan, serta membuka akses bagi masyarakat agar mampu mengembangkan usaha yang dimiliki. Program pemberdayaan ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membangun kemandirian, kreativitas, dan daya saing pelaku usaha.

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan program, pelaksanaan pelatihan atau pendampingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha masyarakat. Tahapan tersebut bertujuan agar program yang diberikan sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat sehingga manfaat yang diterima dapat lebih optimal. Pendampingan secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa masyarakat mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemberdayaan Ekonomi dan Umkm di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan keterampilan usaha, pendampingan kelompok usaha masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pemasaran produk UMKM. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan memiliki kemampuan bersaing di tengah perkembangan ekonomi.

Sebagian masyarakat yang mengikuti pelatihan mampu mengembangkan usaha yang telah dimiliki maupun memulai usaha baru sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain meningkatkan pendapatan keluarga, program ini juga mendorong terciptanya lapangan kerja skala kecil di lingkungan masyarakat.

2. Kelembagaan Masyarakat

Penguatan kelembagaan masyarakat telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembinaan, seperti sosialisasi, pelatihan, pendampingan, koordinasi, serta peningkatan kapasitas pengurus lembaga masyarakat. Program tersebut bertujuan agar setiap lembaga memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsi organisasi, menyusun program kerja, mengelola administrasi, serta mengoordinasikan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Keberadaan lembaga masyarakat juga terbukti mampu menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan, menyelesaikan permasalahan, dan mendukung pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat kelurahan maupun lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga masyarakat, semakin aktifnya pengurus dalam mendukung kegiatan pembangunan, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan. Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan secara berkelanjutan, adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan lembaga masyarakat, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan, serta tingginya semangat gotong royong dan

partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

3. Kesehatan Dan Sosial

Kesehatan dan sosial merupakan aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup, kesejahteraan, serta kemampuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Upaya pemberdayaan pada bidang kesehatan dan sosial tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan berbagai program kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan.

Pelaksanaan program kesehatan dan sosial dilakukan melalui pembinaan kepada masyarakat, koordinasi dengan instansi terkait, pendampingan terhadap kelompok rentan, serta fasilitasi berbagai program bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta kegiatan sosial yang bertujuan memperkuat kepedulian dan solidaritas antarmasyarakat. Pelaksanaan program tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan yang bersifat preventif, edukatif, dan partisipatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemberdayaan

masyarakat pada bidang kesehatan dan sosial telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan program dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga sosial, dan masyarakat melalui pembinaan yang berkelanjutan, koordinasi yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat.

4. Partisipasi Pembangunan

Partisipasi pembangunan merupakan salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat karena mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Partisipasi yang aktif menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat (objek pembangunan), tetapi juga sebagai pelaku utama (subjek pembangunan) yang memiliki hak, tanggung jawab, serta kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang dihadapi di lingkungannya.

Pelaksanaan partisipasi pembangunan di Kota Samarinda diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kegiatan gotong royong, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelompok masyarakat, serta penyampaian usulan pembangunan melalui tingkat RT, kelurahan, hingga forum-forum masyarakat. Partisipasi tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kehadiran atau kontribusi tenaga, tetapi juga melalui pemberian ide, saran, masukan, pengambilan keputusan,

serta kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah kelurahan, dan instansi terkait. Sinergi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi pembangunan di Kota Samarinda telah berjalan dengan baik. Masyarakat telah dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif, komunikasi yang efektif, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penguatan kapasitas masyarakat agar keterlibatan yang diberikan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan partisipasi yang aktif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara lebih partisipatif, berkelanjutan, serta mampu mewujudkan tujuan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

5. Sarana Dan Prasarana Lingkungan

Sarana dan prasarana lingkungan merupakan salah satu indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat karena menjadi penunjang utama dalam meningkatkan kualitas hidup, mendukung aktivitas sosial dan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan lingkungan, drainase, sanitasi, penerangan jalan, fasilitas umum, serta ruang publik, tidak hanya mempermudah aktivitas

masyarakat, tetapi juga mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan menjadi salah satu fokus yang terus dikembangkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda melalui pendekatan yang partisipatif.

Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dilakukan melalui proses identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan skala prioritas, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun. Proses tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia fasilitas, tetapi juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebutuhan pembangunan agar hasilnya sesuai dengan kondisi dan kepentingan masyarakat di setiap wilayah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat di Kota Samarinda. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman, serta mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga mampu menumbuhkan rasa memiliki, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keberlanjutan hasil pembangunan. Dengan demikian, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemberdayaan masyarakat yang mendorong terciptanya masyarakat yang

mandiri, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.

6. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung pemberdayaan masyarakat di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda meliputi komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program secara berkelanjutan, koordinasi dan sinergi yang baik antarinstansi dan lembaga masyarakat, partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta kuatnya budaya gotong royong dan kepedulian sosial. Keseluruhan faktor tersebut saling mendukung sehingga pelaksanaan program pada aspek ekonomi dan UMKM, kelembagaan masyarakat, kesehatan dan sosial, partisipasi pembangunan, serta sarana dan prasarana lingkungan dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya dukungan tersebut, tujuan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diwujudkan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

7. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak hanya berasal dari faktor internal pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, belum optimalnya penyebaran informasi, serta perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berbagai faktor tersebut menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui peningkatan kualitas pembinaan, penguatan koordinasi, optimalisasi sosialisasi program, peningkatan

kapasitas masyarakat, serta dukungan anggaran yang memadai. Dengan upaya tersebut, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan UMKM, kelembagaan masyarakat, kesehatan dan sosial, partisipasi pembangunan, serta sarana dan prasarana lingkungan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Studi Tentang Efektivitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan pada bidang ekonomi dan UMKM telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan usaha. Program tersebut mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
2. Penguatan kelembagaan masyarakat telah meningkatkan fungsi dan peran lembaga masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan mampu memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas pengurus, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan.
3. Program kesehatan dan sosial telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembinaan, penyuluhan, serta fasilitasi pelayanan dan perlindungan sosial. Pelaksanaan program tersebut mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, kepedulian sosial, dan kesejahteraan bersama.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga

evaluasi pembangunan menunjukkan bahwa masyarakat telah berperan aktif sebagai subjek pembangunan. Keterlibatan tersebut memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mendukung terciptanya pembangunan yang lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharannya mampu mendukung aktivitas sosial dan ekonomi sekaligus memperkuat proses pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
6. Keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didukung oleh komitmen pemerintah daerah, koordinasi yang baik antarinstansi, partisipasi aktif masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, serta budaya gotong royong yang masih terjaga. Faktor-faktor tersebut menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan.
7. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, belum optimalnya penyebaran informasi, serta perbedaan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, berbagai kendala tersebut masih dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi, pembinaan, pendampingan, dan penguatan kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Studi Tentang Efektivitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Samarinda diharapkan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan yang lebih terarah, pelaksanaan yang berkelanjutan, serta evaluasi program secara berkala agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda diharapkan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mendukung efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
3. Masyarakat diharapkan berperan lebih aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan dan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga tercipta rasa memiliki, tanggung jawab, dan keberlanjutan terhadap setiap program yang dilaksanakan.

Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang berkesinambungan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta mendukung tercapainya pemberdayaan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyam, M., & Tahir, M. Y. (2021). Ragam jenis penelitian dan perspektif. *Auladuna: Jurnal Pendidikan*.
- Beni, P. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Farisi. (2020). *Jurnal Pendidikan Indonesia*.
- Hadi, Sutrisno. 2016. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasibuan, A. T., Arifin, Z., & Munfa'ati, F. (2022). Konsep dan karakteristik penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Herawati, R. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, R. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indriantoro, Nur & Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*.
- Kerlinger, F. N. (2006). *Foundations of Behavioral Research*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Kurniawan, A. (2020). 4. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Larasati, E (2019). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Wibowo. (2020). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lawrence Neuman. (2019). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Malahati, F., Arifin, A., & Mustika, R. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*.

Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.

Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. Riduwan. (2010). *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Poerwanti, E., & Suwandayani, B. (2020) *Manajemen Organisasi Publik*.

Poerwanti, E., & Suwandayani, B. (2020). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Putra, G. K., Ardiansyah, R., & Rahmat, A. (2023). Dasar filosofis riset kualitatif dan kuantitatif. *Journal of Applied Management and Education Technique*.

Safarudin, R., Santoso, D., & Rahmah, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Journal of Innovative Research*.

Siagian, Sondang P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sugiyono.(2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta.

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jurnal Qosim.

Wiratna Sujarweni. (2010). Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami

Wirawan. (2016). Metodologi Penelitian: Panduan Praktis dalam Penelitian Sosial. Yogyakarta: BPFE.

Internet :

https://dinsos.samarindakota.go.id/struktur-organisasi?utm_source=chatgpt.com

https://ppid.samarindakota.go.id/ppid-pembantu/dinas/dinas-sosial-dan-pemberdayaan-masyarakat?utm_source=chatgpt.cc

LAMPIRAN

Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Bersama *Key Informan* Ibu Lina Puji Astuti, SSTP selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat.



Sumber: Peneliti (9 Maret 2026)

Gambar 2. Dokumentasi wawancara bersama *Informan* Ibu Dr. Hj. Indah Erawati, M.Si selaku Sekertaris dikantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 2. Peneliti (9 Maret 2026)

Gambar 3. Dokumentasi wawancara bersama Ibu Diayah Ariani, S.E. yang menjabat sebagai jabatan fungsional dikantor Pemberdayaan Masyarakat.



Sumber: Peneliti (9 Maret 2026)

Gambar 4. Dokumentara bersama Ibu Pinkan Ramadanti. S.Tr.IP yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayan Masyarakat



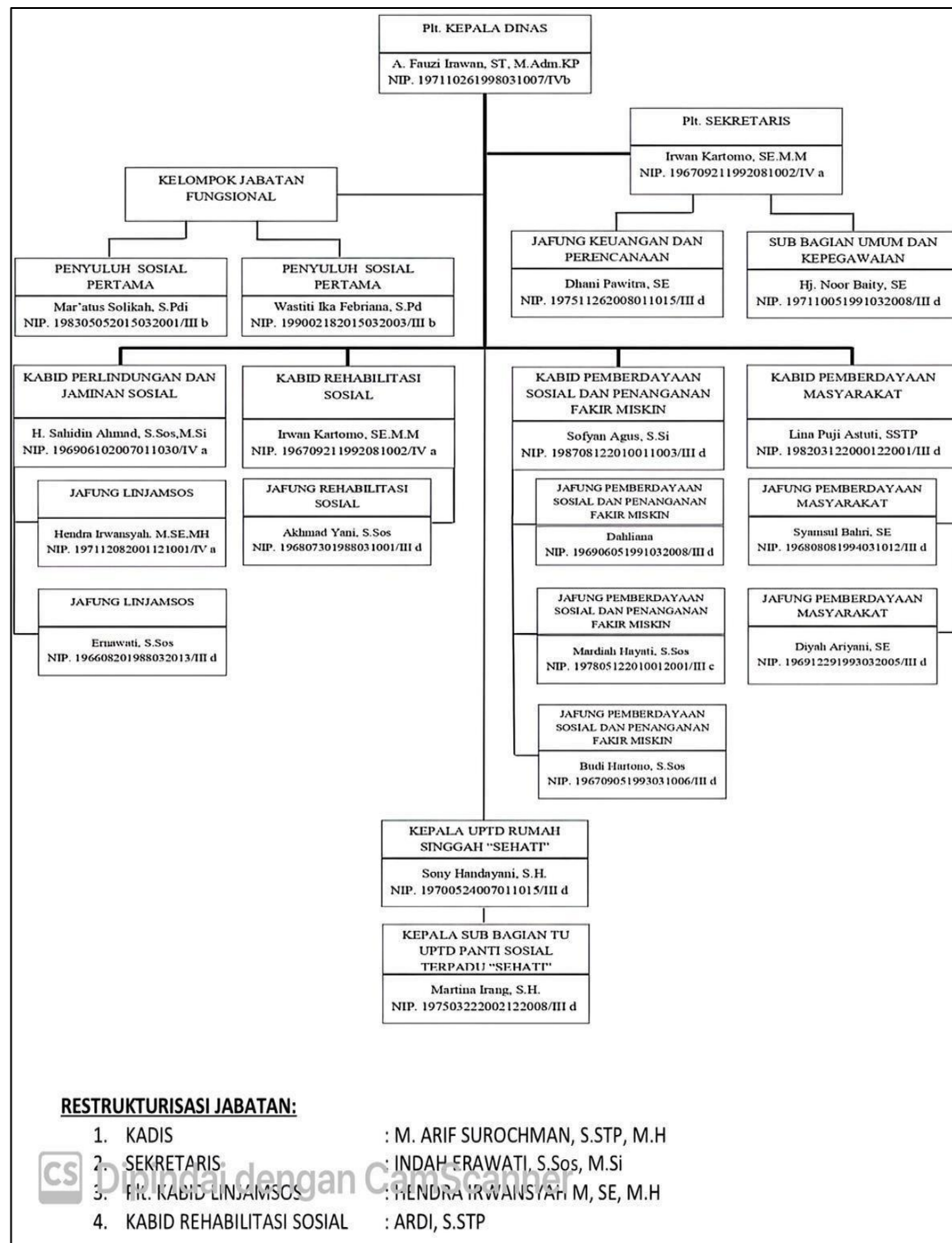
Sumber: Peneliti (9 Maret 2026)

Gambar 5. Dokumentara bersama Bapak Syamsul Bahari yang menjabat sebagai Jabatan Fungsional dikantor Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: Peneliti (9 Maret 2026)

Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda



Sumber : Profil Dinas Sosial Kota Samarinda, 2024

Lampiran : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

**STUDI TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR DINAS SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA**

Pertanyaan !

1. Ekonomi dan UMKM

- a) Menurut Bapak/Ibu apa saja program pemberdayaan ekonomi dan UMKM yang dilaksanakan ?
- b) Menurut Bapak/Ibu siapa saja masyarakat atau pelaku UMKM yang menjadi sasaran program ?
- c) Menurut Bapak/Ibu mengapa program ekonomi dan UMKM tersebut perlu dilaksanakan ?
- d) Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pelaksanaan dan pemberdayaan UMKM dilakukan ?

2. Kelembagaan Masyarakat

- a) Menurut Bapak/Ibu apa bentuk kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat yang dilakukan ?
- b) Menurut Bapak/Ibu siapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pembinaan kelembagaan masyarakat ?
- c) Menurut Bapak/Ibu mengapa penguatan kelembagaan masyarakat diperlukan ?
- d) Menurut Bapak/Ibu bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat ?

3. Kesehatan dan Sosial

- a) Menurut Bapak/Ibu apa program kesehatan dan sosial yang telah dilaksanakan ?

Lampiran : Pedoman wawancara

- b) Menurut Bapak/Ibu siapa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program kesehatan dan sosial ?
- c) Menurut Bapak/Ibu mengapa program kesehatan dan sosial perlu diberikan kepada masyarakat ?
- d) Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan dan manfaat program kesehatan dan sosial bagi masyarakat ?
- 4. Partisipasi Pembangunan
 - a) Menurut Bapak/Ibu apa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan ?
 - b) Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan di lingkungan masyarakat ?
 - c) Menurut Bapak/Ibu mengapa partisipasi masyarakat penting dalam pembangunan ?
 - d) Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ?
- 5. Sarana dan Prasarana Lingkungan
 - a) Menurut Bapak/Ibu apa saja sarana dan prasarana lingkungan yang telah dibangun atau diperbaiki ?
 - b) Menurut Bapak/Ibu siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan sarana dan prasarana lingkungan ?
 - c) Menurut Bapak/Ibu mengapa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan diperlukan ?
 - d) Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dilakukan ?

Lampiran: Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYRAKAT
 Jl. Dahlia No. 12 Telp. (0541) 743598 Fax. (0541) 743598
SAMARINDA

KodePos 75121

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 400.9 /446 / 100.03

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Dra. Hj. Indah Erwati,M.Si
NIP	:	196810071990102001
Pangkat / Gol	:	Pembina Tk. I. IV b
Jabatan	:	Sekretaris Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Dengan ini menerangkan :

Nama	:	Artha Angelina Sepang
Universitas	:	UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
NIM	:	2263201072
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan	:	Administrasi Publik
Jenjang Studi	:	Strata 1 (S1)

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda perihal " **Studi tentang Efektivitas dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda dengan predikat baik.**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Maret 2026

An. Kepala Dinas Sosial
 Dan Pemberdayaan Masyarakat
 Sekretaris,

Dra. Hj. Indah Erwati,M.Si
NIP 19681007 199010 2 001

Lampiran : Pedoman Bimbingan Dosen 1

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO: 0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
 SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : APRHA Angelina Segang
 NPM : 2263201072
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Dr. H. Abdul Rokki S.P.M.P.
 2. AHMAD YAHY S.Sos., M.Si

Judul Skripsi :

Dosen Pembimbing (I / II)

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	14/10/25	Buat judul yg antara lain teori, variabel, tujuan dkk..	/	
2	17/10/25	judul di jelaskan penerapannya. dan paragraf 2.	/	
3	24/10/25	judul ok lanjut paragraf 2	/	

(Hal.)

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Pedoman Bimbingan Dosen 1

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
3	27/11	- pakeh penulisan - referensi terbaru. - sesuai petunjuk ?		
4	22/12	konsep pmbly 2 lanjut pmblyan -		
5	22/12	pmblyan lanjutan		
6	17/3	konsep pmbly 2		
7	01/4	Ok ACC selanjutnya		
8	21/12	konsep pmbly 2, lanjut pmblyan		

(Hal.)

Lampiran : Pedoman Bimbingan Dosen 1

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
9	7/7 ²⁰	perbaiki x konsent ke pemb. 2, dan pengajar		
10	20/7 ²⁰	telah di perbaiki. ACC. pada Jara - , dit. Selesaikan Atmika. rik -		

(Hal.)

Lampiran : Pedoman Bimbingan Dosen 2



UNIVERSITAS WIDYA GAMAH MAHAKAM SAMARINDA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

AKREDITASI P

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 1 JG GAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TAN. 23 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ARTHA ANGELINA SEPANG

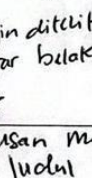
NPM : 22G3201072

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Nama Dosen Pembimbing I & II : 1 Dr. H. ABDUL ROFIK, S.P.M.P.
2 AHMAD YANI, S.Sos., M.Si

Judul Skripsi : "Studi Tentang Efektivitas Bantuan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kantor Dinas Sosial Kota Samarinda"

Dosen Pembimbing (I/II) : _____

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1.	24/10/25	Revisi Judul Bab 1 1/2 L. 111		
2.	27/11/25	- Cover (Ataman Pengesahan, margin 4433) - Mencari masalah yang ingin diteliti (efektivitas) di bagian latar belakang. - Buku 10 tahun terakhir		
3		- Sesuaikan judul (purnusan masalah) - Mencari teori sesuai judul - Kerangka Pktr (Isa dimasukkan Pendapat Para ahli. - fokus penelitian dan deteksi konsep-konsep. - Daftar pustaka.		

Lampiran : Pedoman Bimbingan Dosen 2

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4	12/12	- Halaman Cover - Daftar Isi + tabel - Bab I (spasi 2, Pendahuluan) - Mencari masalah di Pendahuluan (latar belakang) dalam pemberdayaan masyarakat dan disesuaikan dengan tempat penelitian (berdasarkan hasil observasi lokasi penelitian)		
5	20/12	- Bab I : latar belakang, masalah, - Penulisan (font) disesuaikan. - Bahasa Latin (font miring) - Teori menggunakan halaman - Kerangka PIR (harus ada teori pendukung)		
6	12/1	- Bab I : Mencari permasalahan pada judul penelitian. - mencari liter belakang permasalahan. - Rumusan Masalah. - kerangka PIR.		
7	15/12	- Spasi : 2 - Bab I = isi disesuaikan dengan permasalahan sesuai dengan masalah yang terjadi di lokasi. - Rumusan Masalah (bagian Simpulan Teori) - Tujuan Penelitian (Prolog dulu / pengantarannya) - Manfaat Penelitian = menjawab pertanyaan dan Rumusan masalah.		
		- Kerangka PIR (Prolog dulu baru bagian) - II bisa disesuaikan dengan ur - Daftar pustaka.		
8	22/1/20	Revisi Rumusan		

(Hal.)

Lampiran : Pedoman Bimbingan Dosen 2

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
	18/12	- Spasi 2. - Bab 1 = isi disesuaikan dengan Peraturan yang sesuai dengan masalah yg ingin diteliti. - Dasar - Dasar Permasalahan (Bab 1) - Rumusan masalah = simpulan Para ahli. - Tujuan : Prolog / pengertian tujuan - Manfaat penelitian = menjawab pertanyaan dari Rumusan Masalah. - Studi dalam dicari lalu Studi efektivitas. - Peraturan (Permensos nomor 5 tahun 2024) (Kerangka Pikir) - Kerangka Pikir (Penjelasan ^{awal} kerangka Pikir) - Kerangka Pikir (bisa disesuaikan UUP) - Daftar Pustaka.		
				
9	10/2/26	Bimbingan Pedoman wawancara 5 WH		
10	2/4/26	Bab 1 = 4.5. Perbaikan bagian Gambar beserta - Sumber Gambar. - Spasi 1 untuk wawancara. - Penambahan informan 2 orang. - Jelaskan Program dan Pemberdayaan masyarakat. - Daftar Pustaka.		
11	6/4/26	- Daftar Pustaka - Dokumentasi - Rumit - Kerangka Pikir - ACC, Semhas.		

(Hal.)

Lampiran : Pedoman Bimbingan Dosen 2

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
12	6/7/26	-Margin Halaman Judul -Ringkasan: Nama, Judul, Metode, Hasil, Tujuan -Turnitin 30% -Di awal kalimat tidak ada kata "di" -APA yang menjadi permasalahan dalam Penelitian (tan Rumusan Masalah).		
		-Lexi monev (Nama Panjang Lengkap) -Sarana dan Peralatan dalam Peningkatan (isi) -Kerangka Pikir (fontnya disamakan semua) -Berdasarkan: -Daftar Pustaka, 1,5 spasi, Masih Satu Kesatuan Jaraknya. -Daftar Gambar, fontnya gak perlu 2 spasi.		
13	13/7/26	-Margin -Ringkasan (latar belakang, metode, hasil) -Turnitin -Kerangka Pikir (font sama ukurannya) -Daftar Pustaka -Daftar Gambar		
14	21/7/26	- Ringkasan: Penulisan untuk Huruf Kapital - Perbaiki Plagiasi - Kerangka Pikir		
15		Hei apa Persamaan		

(Hal.)

Lampiran : Pedoman Bimbingan Dosen 2

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
16.	15/8 28/87	Perbaikan Pendadaran : - Margin - Angkasan - Kerangka Pikir - Hasil		As
17.	10/8	Revisi		As.